

MENATA ULANG ARAH EKONOMI BERKEADILAN



Editor: Eko Listiyanto

Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan

Penulis:

Riza Annisa Pujarama

Esther Sri Astuti S.A

Izzudin Al Farras Adha

M. Rizal Taufikurahman

Ahmad Heri Firdaus

Nur Komaria

INDEF

Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan

Hak Cipta © *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF)

Tim Penulis:

Penulis:

Riza Annisa Pujarama

Esther Sri Astuti S.A

Izzudin Al Farras Adha

M. Rizal Taufikurahman

Ahmad Heri Firdaus

Nur Komaria

Editor:

Eko Listiyanto

Tata letak: Sarwo Edhie

Desain Sampul: Dimas Kurniawan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Jl. Batu Merah No.45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12510

Telp. 021-7901001 Fax. 021-79194018,

Email: indef@indef.or.id; website: <http://indef.or.id>

November, 2025

Prakata Editor

Stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade (2014-2025) menuntut refleksi yang lebih dalam, jujur, dan berani tentang urgensi menata ulang arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Titik tekannya tentu pada upaya mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dibandingkan sekadar mengejar target pertumbuhan semata. Tekanan struktural domestik, ketidakpastian global, hingga dinamika politik yang kian kompleks tidak hanya menguji ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga mempertanyakan kembali seberapa jauh perkembangan tersebut mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buku **Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan** hadir sebagai upaya untuk menyajikan gambaran utuh mengenai kondisi tersebut, sekaligus memberikan arah pemikiran ke depan agar keadilan benar-benar ditempatkan sebagai fondasi utama kebijakan ekonomi.

Bab pertama memperlihatkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih rapuh di tengah tekanan simultan dari perlambatan ekonomi domestik, lemahnya daya beli, dan ketidakpastian global yang terus meningkat. Ketergantungan yang tinggi pada APBN untuk menopang kegiatan ekonomi tidak diiringi dengan kualitas belanja yang memadai, sementara penerimaan negara menghadapi tren penurunan yang mengkhawatirkan. Dalam situasi demikian, risiko politik dan geopolitik global—mulai dari konflik Timur Tengah hingga memanasnya rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok—berdampak langsung pada arus investasi dan stabilitas ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya mungkin dicapai apabila stabilitas politik, efektivitas fiskal, dan ketahanan eksternal diperlakukan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bab kedua menyoroti krisis kerja layak yang semakin menahan mobilitas sosial masyarakat. Di tengah narasi optimisme penurunan pengangguran, kualitas pekerjaan justru mengalami kemunduran. Dominasi sektor informal, tumbuhnya pekerja *platform* dalam skema kemitraan semu,

serta meningkatnya ketidakpastian pendapatan menjadi tanda bahwa struktur pasar kerja Indonesia belum pulih secara substantif pascapandemi. Ekspansi ekonomi digital memang membuka peluang baru, tetapi tanpa regulasi dan perlindungan sosial yang memadai, peluang tersebut justru memperlebar jurang kerentanan sosial. Oleh karena itu, pembaruan besar dalam regulasi ketenagakerjaan, perluasan jaminan sosial, dan penciptaan pekerjaan formal harus menjadi prioritas utama.

Bab ketiga mengungkap fenomena yang relatif jarang mendapatkan ruang dalam perdebatan publik: menguatnya resentralisasi dalam tata kelola pemerintahan dan implikasinya bagi ketimpangan wilayah. Sejumlah regulasi baru telah mengalihkan kembali kewenangan penting dari daerah ke pusat, membuat kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan memperkuat ekonomi lokal semakin terbatas. Ketergantungan tinggi terhadap transfer fiskal—yang porsinya terus menurun terhadap total belanja negara—memperdalam ketimpangan antarwilayah, terutama antara daerah kaya sumber daya dan daerah tertinggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa janji otonomi daerah belum sepenuhnya terwujud, dan tanpa koreksi yang tepat, ketimpangan spasial ini akan tetap menjadi beban struktural pembangunan nasional.

Bab keempat memperdalam analisis dengan membahas ketimpangan pendapatan yang terus membeku meskipun tingkat kemiskinan menurun. Konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok, stagnasi produktivitas tenaga kerja, hingga fenomena “serakahnomics” dan *profit-led inflation* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kesempatan yang merata. Pertumbuhan yang didominasi sektor kapital-intensif telah menciptakan kondisi di mana sebagian besar keuntungan ekonomi tidak mengalir kepada masyarakat luas. Mobilitas sosial melemah, kelas menengah stagnan, sementara kebijakan sosial masih cenderung bersifat jangka pendek dan konsumtif. Tanpa reformasi fiskal progresif, redistribusi aset, dan penguatan modal manusia, keadilan sosial tidak akan tercapai.

Bab kelima merupakan analisis dan proyeksi INDEF tentang kinerja perekonomian 2026 mendatang. Berbagai indikator makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar Rupiah, serta indikator

kesejahteraan yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, yang menjadi target pemerintah pada 2026 diulas dan dikritisi dengan ‘pisau’ analisis mendalam. Catatan-catatan dijabarkan khususnya terkait dengan rasionalitas target di tengah berbagai keterbatasan dan sempitnya manuver kebijakan fiskal dan moneter akibat interrelasi Indonesia dengan situasi ekonomi global.

Sebagai editor, saya meyakini bahwa buku ini tidak hanya menawarkan analisis, tetapi juga memberikan arah. Arah tersebut mengajak kita menata ulang kembali kompas pembangunan nasional: dari orientasi pertumbuhan semata menjadi orientasi yang menempatkan manusia, kesempatan, dan kesejahteraan sebagai pusat kebijakan. Ekonomi berkeadilan bukan sekadar slogan; ia menuntut keberanian politik, desain kebijakan yang progresif, serta komitmen untuk membenahi struktur ekonomi yang timpang. Indonesia membutuhkan kebijakan fiskal yang inklusif, pasar kerja yang melindungi, desentralisasi yang efektif, serta strategi pembangunan wilayah yang memungkinkan semua daerah berkembang tanpa ketergantungan yang berlebihan.

Akhir kata, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026. Buku ini merupakan bagian dari kegiatan Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) yang secara rutin diselenggarakan oleh INDEF sejak berdiri pada 1995. Kami berharap buku ini dapat menjadi kontribusi penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, dan masyarakat luas dalam merumuskan masa depan ekonomi Indonesia yang lebih adil dan berdaya tahan dari segala guncangan. Semoga gagasan-gagasan dalam buku ini dapat memperkaya diskusi publik dan menginspirasi langkah-langkah strategis menuju Indonesia yang benar-benar berkeadilan. Selamat membaca.

Eko Listiyanto

Editor/Direktur Pengembangan Big Data INDEF

Daftar Isi

Prakata Editor	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii
BAB I Perkembangan Ekonomi Domestik dan Global	1
1.1. Kinerja Ekonomi Domestik	1
1.2. Perkembangan Ekonomi Global	10
BAB II Informalitas dan Ketenagakerjaan	17
2.1. Asta Cita dan Polemik Tuntutan Kerja Layak	17
2.2. Kondisi Ketenagakerjaan Terkini	19
2.3. Tantangan Struktural Ketenagakerjaan	21
2.4. Krisis Pekerjaan Layak dan Kekosongan Kebijakan	22
2.5. Penutup	27
BAB III Resentralisasi dan Stagnasi Ketimpangan Wilayah	29
3.1. Resentralisasi Regulasi	29
3.2. Transfer Ke Daerah	32
3.3. Kapasitas Fiskal Daerah	34
3.4. Kapasitas Fiskal Daerah dan Transfer Ke Daerah	38
3.5. Kapasitas Fiskal Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto	42
3.6. PP 38/2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat	44
BAB IV Memutus Jerat Ketimpangan Pendapatan	49
4.1. Pendahuluan	49
4.2. Kondisi Struktur Ketimpangan di Indonesia	53
4.3. Kelas Menengah dan Dinamika Sosial Ekonomi	65
4.4. Indikator Kesejahteraan: Kemiskinan, TPT, dan Kesejahteraan Sosial	68
4.5. Evaluasi Program Pengentasan Program Kemiskinan 2025	71
4.6. Penutup: Rekomendasi Kebijakan	72
BAB V Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026	75
5.1. Arah Ekonomi Global 2026	75

5.2. Pertumbuhan Ekonomi	77
5.3. Inflasi	79
5.4. Nilai Tukar Rupiah	80
5.5. Tingkat Pengangguran	82
5.6. Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini	83
Daftar Pustaka	85

Daftar Tabel

Tabel 1. 1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Triwulan III 2022-2025	3
Tabel 1.2.	Perkembangan Indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025	4
Tabel 1.3.	Sasaran Indikator Pembangunan 2025	5
Tabel 1.4.	Realisasi APBN s.d. 30 September 2025	7
Tabel 2.1.	Perbandingan Regulasi dan Skema untuk Pekerja Platform	26
Tabel 3.1.	Deregulasi Kewenangan Pemerintah Daerah	31
Tabel 3.2.	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Tiap Provinsi Per Pulau Besar, 2024	36
Tabel 3.3.	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Aceh, 2024	37
Tabel 5.1.	Ringkasan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026	84

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Perkembangan BI Rate dan Fed Rate	9
Gambar 1.2.	Indeks Harga Komoditas	11
Gambar 2.1.	Tren Orang Bekerja dan Pengangguran, 2005-2025	19
Gambar 2.2.	Tren Pekerja Formal dan Informal, 2019-2025	20
Gambar 2.3.	Presentase Pekerja Pemuda Berdasarkan Mismatch, 2024	21
Gambar 2.4.	Total Pekerja Gig & Pekerjaan Memakai Internet	23
Gambar 2.5.	Pertumbuhan Rata-Rata Pendapatan Pekerja Gig dan Pekerjaan Pakai Internet	24
Gambar 3.1.	Rasio Transfer ke Daerah terhadap Belanja Negara dalam APBN 2016 s.d. 2026 (persen)	33
Gambar 3.2.	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Per Provinsi, 2024	35
Gambar 3.3.	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Transfer ke Daerah Seluruh Provinsi, 2024	39
Gambar 3.4.	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan PDRB per Kapita (Rupiah), 2024	42
Gambar 4.1.	Rasio Gini di Indonesia 2019-2025	50
Gambar 4.2.	Tren Ketimpangan Penguasaan Aset 2005-2025	54
Gambar 4.3.	Tren Ketimpangan Sumber Pendapatan 2005-2025	57
Gambar 4.4.	Ketimpangan Fiskal Daerah per Kapita	58
Gambar 4.5.	Tren Ketimpangan Laba Korporasi dan Daerah 2005-2025	61
Gambar 4.6.	Tren Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi DKI dan NTT 2005-2025	62

Gambar 4.7. Literasi Digital dan Tingkat Melek Teknologi Informasi 2015-2024	63
Gambar 4.8. Indeks Literasi Digital Menurut Usia 2020-2024	64
Gambar 4.9. Tren Proporsi dan Jumlah Kelas Menengah 2015-2024	65
Gambar 4.10. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem per Maret 2014-2025	68
Gambar 4.11. Kemiskinan dan TPT Periode 2014-2025	69
Gambar 4.12. Pendapatan Per Kapita 2014-2025	70

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

Ekonomi domestik masih mendapat tekanan yang cukup kuat baik dari dalam maupun luar negeri. Tantangan perlambatan ekonomi domestik belum dapat diatasi, pelemahan daya beli dan tekanan pada industri manufaktur padat karya terus berlanjut di 2025. Sementara itu APBN yang menjadi tumpuan untuk mendorong perekonomian juga mengalami kendala, mulai dari penerimaan perpajakan yang terus tertekan, realisasi belanja yang lambat, dan kualitas belanja yang belum membaik berdampak pada rendahnya efek berganda pada perekonomian. Di sisi lain, dinamika politik dan stabilitas dalam negeri membuat risiko meningkat yang ikut mempengaruhi keputusan penanaman modal asing. Penurunan suku bunga acuan BI belum bisa menekan suku bunga kredit perbankan lebih jauh.

Sementara itu tingkat ketidakpastian global masih tinggi karena tekanan geopolitik memasuki babak baru, mulai dari perjuangan Palestina dan agresivitas invansi Israel, meningkatnya eskalasi perang saudara Sudan yang melibatkan Uni Emirat Arab, dan gelombang gejolak politik dalam negeri di berbagai negara karena ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahan masing-masing. Di sisi lain, kebijakan perdagangan Amerika Serikat terhadap China yang sulit diprediksi membuat fragmentasi global dan kebijakan proteksionisme meningkat.

1.1. Kinerja Ekonomi Domestik

Capaian Asumsi Dasar Makro APBN 2025: Perlambatan Konsumsi Rumah Tangga, Pertumbuhan Tertahan

Pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di 2024, yaitu sebesar 5,04 persen. Namun demikian angka ini melambat jika dibandingkan dengan capaian triwulan II-2025. Rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan I-III 2025 adalah sebesar 5,01 persen, artinya untuk mencapai target pertumbuhan 5,2 persen di 2025 membutuhkan upaya lebih kencang.

Sektor Pertambangan & Penggalian dan sektor Konstruksi, yang merupakan dua dari lima sektor penopang PDB, tumbuh melambat dibandingkan triwulan III-2024, sementara itu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan yang lebih tinggi (meningkat 3,24 persen) dibandingkan sektor Industri Pengolahan (meningkat 0,82 persen) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (meningkat 0,67 persen).

Peningkatan performa sektor industri manufaktur juga terkonfirmasi dari Indeks Manufaktur PMI yang secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan capaian di triwulan II-2025. Pada Agustus-September 2025 nilainya di atas 50 yang mengindikasikan adanya ekspansi. Meskipun performansi sektor industri manufaktur mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun lalu, namun sub-sektor industri pengolahan yang padat karya mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup dalam. Perlambatan pertumbuhan tersebut misalnya pada Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki yang tumbuh -0,25 persen di triwulan III-2025, turun cukup dalam dibandingkan triwulan III-2024 yang tumbuh 10,15 persen. Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada Industri Industri Tekstil dan Pakaian Jadi tumbuh melambat sebesar 0,93 persen di triwulan III-2025 dibandingkan triwulan III-2024 sebesar 7,43 persen. Perlambatan ini juga terefleksikan pada gelombang penutupan pabrik yang diikuti PHK massal yang terus berlanjut sejak semester II-2024 hingga saat ini.

Jika dilihat dari sisi PDB Pengeluaran, Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih tertekan. Hal ini juga terkonfirmasi dari Indeks Keyakinan Konsumen yang tren-nya juga menurun. Selain itu capaian realisasi penerimaan perpajakan neto atas PPN & PPnBM hingga September 2025 menunjukkan perlambatan -13,2 persen dibandingkan periode yang sama di 2024. Sub-sektor yang menunjukkan *leisure* (wisata) juga belum menunjukkan perbaikan, seperti Restoran dan Hotel dan Transportasi dan Komunikasi. Padahal sub-sektor tersebut diperkirakan meningkat seiring pemberian stimulus fiskal untuk sektor Transportasi dan subsidi upah di bulan Juni-Juli 2025.

Tabel 1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Triwulan III 2022-2025

PDB Menurut Pengeluaran	Pertumbuhan (%yoy)			
	2022	2023	2024	2025
	Triwulan III	Triwulan III	Triwulan III	Triwulan III
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5.4	5.05	4.91	4.89
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2.67	4.01	4.23	4.11
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	4.42	3.58	3.41	4.21
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	2.3	3.77	3.68	3.74
d. Kesehatan dan Pendidikan	1.04	4.23	4.35	4.06
e. Transportasi dan Komunikasi	12.87	7.68	6.54	6.41
f. Restoran dan Hotel	9.12	6.52	6.61	6.32
g. Lainnya	1.66	3.04	3.85	4.92

Sumber: BPS

Inflasi pada Oktober 2025 sebesar 2,86 persen, masih masuk dalam rentang target +/- 1 persen dari asumsi. Pola pergerakan inflasi di 2025 berbeda dengan inflasi di 2024. Jika sepanjang 2024 arahnya menurun, di 2025 pola pergerakannya terus mengalami peningkatan. Peningkatan inflasi sejak Juni 2025 yang berlangsung hingga Oktober 2025 didorong terutama karena inflasi harga bergejolak dari pangan. Inflasi inti sepanjang 2025 terutama dikarenakan harga emas yang mengalami pergerakan peningkatan.

Tabel 1.2. Perkembangan Indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

Indikator	APBN	Realisasi	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi, (% yoy)	5,2	5,04	Data triwulan III-2025
Inflasi (%)	2,5	2,86	Per Oktober 2025
Nilai Tukar (Rp/US\$)	16.000	16.413 (ytd)	Kurs tengah BI s.d 10 Okt 2025
Yield SBN 10 Tahun (%)	7	6,77 (ytd)	Realisasi s.d. lelang SUN terakhir (7 Okt '25)
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	82	69,01 (ytd)	Realisasi s.d. September 2025
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	605	580,3	Realisasi s.d. September 2025
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.005	974,0	Realisasi s.d. September 2025

Sumber: APBN Kita Oktober 2025, Kemenkeu; Bank Indonesia, BPS, 2025

Nilai tukar sepanjang 2025 mengalami tekanan yang cukup tinggi di bulan April dan September. Pada bulan April bahkan sempat mencapai level terendah yaitu Rp16.943/USD. Sejak September hingga awal November Rupiah terus bertahan di angka rata-rata Rp16.579/USD. Dengan asumsi makro kurs APBN 2025 sebesar Rp16.000/USD) maka depresiasi ini bisa dikatakan cukup dalam. Pelemahan Rupiah dipicu karena kebutuhan bayar utang luar negeri, pembiayaan impor dan serta *capital outflow* yang dipicu oleh moderatnya prospek perekonomian, gejolak sosial, hingga menipisnya *spread* seiring penurunan suku bunga acuan.

Imbal hasil SBN sepanjang 2025 mengalami penurunan dibandingkan 2024. Hal ini karena turunnya suku bunga acuan The Fed yang juga diikuti dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Sementara itu harga minyak mentah Indonesia lebih rendah dari asumsi makro (82 USD/barel) yaitu sebesar 69,01 USD/barel. Turunnya harga ICP ini juga karena harga minyak global yang cenderung melemah seiring perlambatan perekonomian global.

Capaian Sasaran Indikator Pembangunan 2025: Paradoks Capaian Statistik dan Kenyataan

Capaian sasaran indikator pembangunan hingga Oktober 2025 menunjukkan bahwa arah perkembangannya menuju perbaikan, meskipun untuk indikator tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, dan Nilai Tukar Nelayan belum mencapai target di 2025. Sayangnya, perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan tersebut tampak lebih sebagai ‘kosmetik’ statistik dibanding realitas di lapangan. Pada kenyataannya daya beli masyarakat masih rendah, PHK di sektor industri pengolahan padat karya terus bergulir seiring dengan tutupnya pabrik-pabrik manufaktur, dan dunia bisnis masih kesulitan untuk ekspansi karena ekosistem bisnis yang tidak kondusif. Puncak tekanan ekonomi ini adalah meledaknya demo besar di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025.

Tabel 1.3. Sasaran Indikator Pembangunan 2025

Indikator	2024	2025		Keterangan
		Target	Capaian	
Tingkat Kemiskinan (%)	9,03 (per Maret)	7,0 - 8,0	8,47	Per Maret 2025
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	1,26 (per Maret)	0	0,85	Per Maret 2025
Rasio Gini (Indeks)	0,379 (per Maret)	0,379 - 0,382	0,375	Per Maret 2025
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91 (per Agustus)	4,5 - 5,0	4,85	Per Agustus 2025
Nilai Tukar Petani (Indeks)	119,14 (ytd Oktober)	115 - 120	122,97	ytd Oktober 2025
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	101,71 (ytd Oktober)	105 - 108	103,61	ytd Oktober 2025

Sumber: APBN 2025, Kementerian Keuangan; BPS, 2025

Tingkat kemiskinan secara makro mengalami penurunan, namun tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami peningkatan. Hal ini diperparah dengan meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan perkotaan (mengukur distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran) dan

meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan perkotaan (mengukur kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dan garis kemiskinan). Kemiskinan perkotaan mengalami peningkatan yang diikuti ketimpangan antar penduduk miskin. Jika dilihat dari kewilayahan, 52,66 persen penduduk miskin tinggal di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan paradoks yang miris, ketika Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDB tapi juga memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi. Artinya kue ekonomi yang besar belum mencukupi kesejahteraan penduduk di Pulau Jawa.

Capaian Rasio Gini menunjukkan penurunan, tetapi masih tinggi. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan ketimpangan di perdesaan. Sementara itu angka pengangguran terbuka per Agustus mengalami penurunan, namun jika data ini dibedah maka akan terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pekerja tidak penuh, baik setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami peningkatan jika dibandingkan periode Agustus 2025 dengan Agustus 2024. Hal ini menunjukkan meningkatnya pengangguran terselubung yaitu penduduk bekerja tapi produktivitas rendah. Di sisi lain, profil penduduk bekerja masih didominasi *low skill labor*, tingkat pengangguran terbuka usia muda masih sangat tinggi yaitu 16,89 persen, pekerja *gig* meningkat, dan jumlah kategori pekerja keluarga/tidak dibayar jumlahnya mencapai 18,99 juta jiwa.

Capaian Realisasi APBN 2025: Daya Dorong Belanja Pemerintah Lemah

Hingga September 2026, realisasi Pendapatan dan Belanja APBN 2025 mengalami perlambatan. Kali ini berbeda dengan pola biasanya, Belanja-pun ikut melambat. Hal ini tidak lepas dari adanya kebijakan efisiensi sehingga ada anggaran yang di blok. Kementerian Keuangan sendiri telah mengumumkan 3 K/L yang memiliki anggaran besar namun realisasi belanjanya masih di bawah 50 persen seperti BGN realisasinya 16,9 persen, Kementerian Pekerjaan Umum realisasinya 48,2 persen, dan Kementerian Pertanian realisasinya 32,8 persen. Namun demikian, yang mengalami perlambatan belanja bukan hanya belanja K/L tetapi juga belanja non-K/L yang perlambatannya lebih dalam dibandingkan dengan belanja K/L yaitu sebesar -2,9 persen.

Melihat belanja pemerintah yang lambat, maka hal ini perlu menjadi perhatian. Upaya mendorong percepatan belanja pemerintah ini juga perlu memperhatikan kualitas dan *magnitude*-nya terhadap penciptaan dampak berganda di sektor rill, bukan semata-mata dibelanjakan untuk menghabiskan anggaran. Pola penghabisan anggaran di akhir tahun memang bukan hal yang baru, namun, perlambatan belanja yang terjadi di sepanjang 2025 adalah hal yang baru terjadi.

Tabel 1.4. Realisasi APBN s.d. 30 September 2025

Uraian (Rp triliun)	2024				2025			
	Perpres Outlook 206/2024	Real s.d. 30 Sept	% thdp Perpres 206/2024	Growth (%)	Outlook (Lapsem)	Real s.d. 30 Sept	% thdp Outlook (Lapsem)	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	2.802,5	2.008,6	71,7	(1,3)	2.865,5	1.863,3	65,0	(7,2)
a.l. 1. Penerimaan Perpajakan	2.218,4	1.561,6	70,4	(1,4)	2.387,3	1.516,6	63,5	(2,9)
1. Penerimaan Pajak	1.921,9	1.354,9	70,5	(2,4)	2.076,9	1.295,3	62,4	(4,4)
2. Kepabeanan & Cukai	296,5	206,7	69,7	5,7	310,4	221,3	71,3	7,1
2. PNPB	549,1	430,3	78,4	(4,8)	477,2	344,9	72,3	(19,8)
B. BELANJA NEGARA	3.343,5	2.251,8	67,3	14,4	3.527,5	2.234,8	63,4	(0,8)
1. Belanja Pemerintah Pusat	2.485,9	1.616,3	65,0	15,7	2.663,4	1.589,9	59,7	(1,6)
1. Belanja K/L	1.090,8	803,4	73,6	20,0	1.275,6	800,9	62,8	(0,3)
2. Belanja non-K/L	1.395,1	812,9	58,3	11,7	1.387,8	789,0	56,8	(2,9)
2. Transfer Ke Daerah	857,6	635,6	74,1	11,3	864,1	644,9	74,6	1,5
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(43,7)	118,1	(270,1)	(69,7)	(109,9)	18,0	(16,4)	(84,8)
D. SURPLUS/ (DEFISIT)	(541,0)	(243,2)	45,0	(458,2)	(662)	(371,5)	56,1	52,7
% thd DB	(2,37)	(1,10)			(2,78)	(1,56)		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	541,0	347,9	64,3	113,1	662,0	458,0	69,2	31,7

Sumber: APBN Kita Oktober 2025, Kementerian Keuangan

Sama halnya dengan belanja pemerintah pusat yang kontraksi, belanja APBD menurut data Kementerian Keuangan menunjukkan kontraksi sebesar 13,1 persen yang disebabkan transisi kepemimpinan dan kebijakan efisiensi. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang implikasinya adalah capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang ikut melambat.

Sementara itu, penerimaan perpajakan terkontraksi cukup dalam sebesar -2,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2024. Kontraksi penerimaan perpajakan dikarenakan kontraksi penerimaan pajak yang cukup dalam sebesar -4,4 persen. Penerimaan pajak yang melambat bersumber dari PPh Badan neto yang hingga September 2025 terkontraksi -9,4 persen dan PPh dan PPhBM neto yang terkontraksi -13,2 persen. Perlambatan ini mengkonfirmasi gelombang penutupan pabrik industri pengolahan padat karya yang terus berlanjut, sekaligus daya beli yang terus tergerus.

Di tengah perlambatan pendapatan dan belanja negara, pembiayaan anggaran mengalami pertumbuhan sebesar 31,7 persen dengan realisasi mencapai 69,2 persen, menjadi yang tertinggi. Penarikan utang hingga September 2025 mencapai 501,5 triliun Rupiah dari rencana 731,5 triliun Rupiah. Hal ini menambah akumulasi utang pemerintah dari SBN dan Pinjaman menjadi 9,302 triliun Rupiah per September 2025.

Stimulus Fiskal Belum Mendongrak Daya Beli

Stimulus fiskal yang digelontorkan Pemerintah sejak triwulan I-2025 hingga triwulan III-2025 belum dapat mengungkit daya beli masyarakat yang ditunjukkan dengan perlambatan konsumsi rumah tangga dan menurunnya pendapatan perpajakan PPh&PPhBM. Hal ini karena pemberian stimulus fiskal bagi kelas menengah sangat minim dibandingkan dengan masyarakat yang tergolong miskin.

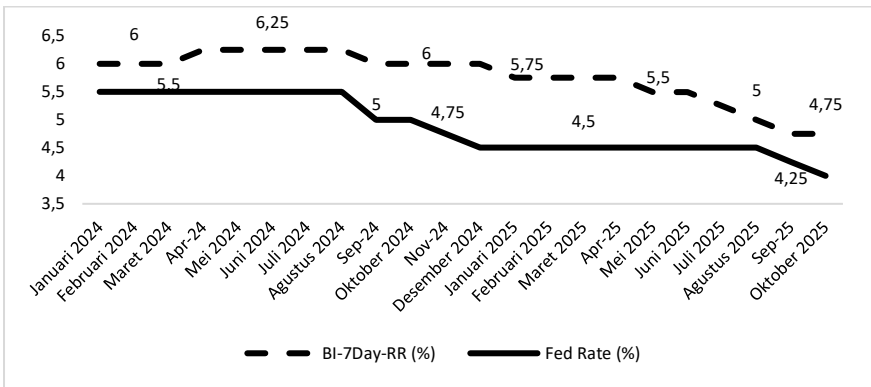
Stimulus ekonomi triwulan I-2025 yang dapat dirasakan oleh kelas menengah sangat terbatas yaitu diskon listrik, insentif perumahan, dan potongan PPh di sektor industri padat karya. Di triwulan II-2025 dan sebagian triwulan III-2025 insentifnya menjadi lebih terbatas lagi, karena diskon listrik tidak diteruskan digantikan dengan diskon transportasi, tarif tol, subsidi gaji (yang banyak tidak tepat sasaran), dan diskon BPJS Kecelakaan Kerja.

Sementara stimulus fiskal yaitu Paket Ekonomi 8+4+5 baru diumumkan pertengahan September dan diimplementasikan di Oktober, sehingga baru akan terlihat dampaknya di triwulan IV-2025. Dampak tersebut masih bergantung pada kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi Paket Ekonomi mengingat kendala-kendala teknis baik itu berupa keakuratan data dan efektivitas koordinasi lintas lembaga kerap menjadi ‘batu sandungan’ yang menumpulkan manfaat stimulus itu sendiri.

Perkembangan Kredit Perbankan

Kombinasi guyuran likuiditas yang bersumber dari kas pemerintah sebesar Rp200 triliun ditambah dengan penurunan suku bunga acuan BI ternyata belum mampu mendorong pertumbuhan kredit secara kencang. Pada September, pertumbuhan likuiditas M2 sebesar 7,99 persen sementara itu laju kredit tumbuh 7,7 persen, lebih besar 0,14 persen dibanding Agustus 2025. Penurunan suku bunga kredit perbankan sangat kecil, dari 9,2 persen di awal 2025 turun menjadi 9,05 persen di September 2025, yang membuat jumlah fasilitas kredit yang belum dicairkan pada September 2025 mencapai Rp2.374,8 triliun (Bank Indonesia, 2025). Mengingat strategisnya sektor perbankan bagi perekonomian Indonesia, maka jika laju kredit tidak mencapai dua digit, maka akan semakin sulit target pertumbuhan ekonomi di 2025 ini bisa terealisasi.

Gambar 1.1 Perkembangan BI Rate dan Fed Rate



Sumber: BI, *Trading Economics*

Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang hampir mendekati suku bunga the Fed memang memberikan tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi ekonomi sektor riil perlu segera didorong untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Namun di sisi lain, seiring spread bunga acuan yang menipis dibandingkan dengan Fed rate akan mendorong *cash outflow* pada pasar modal. Dengan suku bunga imbalan yang semakin rendah akan menurunkan minat investor asing. Oleh karena itu, strategi *pro growth* dari sektor moneter perlu dilakukan dari berbagai sisi, tidak hanya bertumpu pada naik-turunnya bunga acuan. Kebijakan penurunan BI rate harus terukur agar stabilitas perekonomian tetap terjaga, sementara kebijakan makprudensial perlu lebih gencar agar sektor riil strategis lebih kencang berputar.

1.2. Perkembangan Ekonomi Global

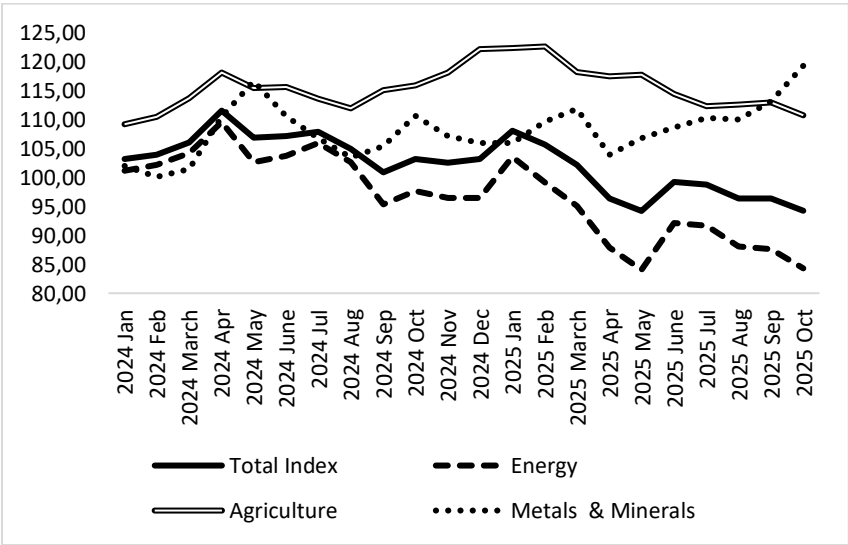
Perang Dagang dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Indeks ketidakpastian global mencapai puncak tertinggi di September 2025. Ketidakpastian global yang tinggi ini juga diikuti oleh peningkatan pada tingkat indeks ketidakpastian perdagangan dan indeks ketidakpastian kebijakan. Hal tersebut disebabkan karena dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang berlanjut dan sulit diprediksi, ketegangan geopolitik antar negara yang masih tinggi, dan gejolak dinamika politik dalam negeri di banyak negara yang memanas karena kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.

Tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China diprediksi belum akan mereda, bahkan ketika sudah tercipta kesepakatan antara keduanya, durasi kesepakatan kian tidak pasti karena bisa sewaktu-waktu berubah bergantung dengan realisasi perdagangan dan kebijakan perdagangan yang diambil Amerika Serikat. Hal ini ikut memberikan ketidakpastian kebijakan perdagangan pada negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan AS dan China. Untuk membangun ketahanan domestik, Indonesia terus melakukan perluasan hubungan diplomatik termasuk sudah melakukan persetujuan perdagangan bilateral dalam bentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement* dan aktifnya Indonesia di berbagai forum internasional.

Ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, dinamika ketidakpastian perang dagang, meningkatnya kebijakan proteksionisme, fragmentasi ekonomi, risiko fiskal yang meningkat karena peningkatan utang global, volatilitas keuangan dan tekanan di pasar tenaga kerja membuat berbagai lembaga internasional memproyeksikan capaian pertumbuhan ekonomi global di 2025 dan 2026 melambat dibandingkan 2024. Baik IMF dan OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 sebesar 3,2 persen, sementara Bank Dunia angka proyeksinya lebih kecil lagi sebesar 2,3 persen. Begitu juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025, IMF dan OECD memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,9 persen, sementara Bank Dunia memproyeksikan sebesar 4,7 persen. Sementara itu, untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2026, IMF paling optimis dengan angka proyeksi sebesar 3,1 persen, disusul OECD sebesar 2,9 persen, dan Bank Dunia sebesar 2,4 persen. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 menurut Bank Dunia akan meningkat ke 4,8 persen, sementara OECD dan IMF memproyeksikan sebesar 4,9 persen, tidak berubah dari proyeksi mereka untuk 2025.

Gambar 1.2. Indeks Harga Komoditas



Sumber: World Bank, 2025

Secara umum perlambatan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat dan China ikut mendorong perlambatan ekonomi dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global digambarkan dari beberapa indikator seperti indeks volume perdagangan dunia yang turun baik di negara-negara maju maupun negara berkembang, indeks volume perdagangan di negara berkembang jatuh lebih dalam dibandingkan dengan negara maju. Sementara itu, indeks volume perdagangan Amerika Serikat sejak April jatuh dan terus melambat. Kondisi ini mengait ke harga-harga komoditas yang diproyeksikan mengalami penurunan, sehingga menjadi perhatian bagi negara-negara yang basis ekspor komoditas seperti Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Ketimpangan dan Kemiskinan Global

Secara umum pergerakan tingkat kemiskinan global mengalami penurunan, sementara itu tingkat ketimpangan di dunia meski tidak seluruhnya mengalami tren meningkat, namun masih tetap tinggi. Tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan implikasi sebagai berikut (the 2025 G20 Extraordinary Committee of Independent Experts on Global Inequality, 2025): 1. Melemahkan demokrasi dan merusak politik; 2. Melemahkan aktivitas ekonomi dan pengurangan kemiskinan; 3. Melemahkan kemampuan untuk menghentikan kerusakan iklim; dan 4. Melemahkan kemajuan sosial.

Dalam laporan World Inequality Report (2022) menyebutkan bahwa 50 persen penduduk berpendapatan bawah menguasai 8,5 persen total pendapatan dunia. Sementara 52 persen pendapatan dunia dikuasai oleh 10 persen penduduk berpendapatan atas. Jika diukur dengan kesejahteraan, maka 10 persen penduduk berpendapatan atas, menguasai 76 persen total kesejahteraan. Sementara 50 persen penduduk berpendapatan bawah hanya menguasai 2 persen kesejahteraan. Hal yang serupa juga disebutkan dalam The World Social Report (2025) mengungkapkan bahwa pendapatan dan kekayaan semakin terkonsentrasi di kalangan atas. Porsi pendapatan yang diterima satu persen penduduk terkaya meningkat atau tetap stabil-meskipun pada tingkat tinggi sekitar 60 persen, data berbagai negara dari tahun 1990 hingga 2022. Mengutip Oxfam International (2024) bahwa satu persen orang

terkaya di dunia saat ini memiliki kekayaan lebih dari 95 persen penduduk dunia.

Global Inequality Report (2025) menunjukkan bahwa 1 persen orang terkaya telah mengalami peningkatan kekayaan rata-rata sebesar US\$1,3 juta sejak tahun 2000, sementara seseorang di separuh masyarakat termiskin mengalami peningkatan kekayaan rata-rata sebesar US\$585 selama periode yang sama (dalam dolar AS konstan tahun 2024).

United Nation (2025) mengungkapkan bahwa meskipun kemiskinan menunjukkan tren penurunan, namun masyarakat merasa tidak aman dengan kondisi ekonomi. Hampir sepertiga penduduk dunia hidup dalam kerentanan yang dapat jatuh miskin bahkan dengan kejutan yang ringan. Hal tersebut terjadi karena proporsi pekerja informal yang terus meningkat dan bertambahnya jumlah pekerja yang bekerja di pekerjaan tidak tetap, sehingga ketidakstabilan ekonomi meluas. Hampir 60 persen orang di seluruh dunia sangat khawatir akan kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan.

Meningkatnya ketidakstabilan pekerjaan dan meningkatnya pekerjaan tidak tetap, bahkan di sektor formal, juga terjadi di negara-negara berpenghasilan tinggi yang menyebabkan ketidakamanan pendapatan di kalangan pekerja. Berkembangnya *pekerja gig* semata-mata bukanlah karena fleksibilitas pekerjaan yang ditawarkan menjadi pilihan, tapi karena ketersediaan pekerjaan layak dengan kontrak yang memadai kian menyusut (United Nation, 2025).

Box 1.

Gen-Z Motor Penggerak Perubahan di Nepal

Bulan September menjadi saksi pergerakan besar di berbagai belahan dunia yang dimotori oleh Gen-Z. Generasi ini tumbuh dalam ekosistem melek teknologi dan aktif di sosial media. Pergerakan yang dimotori-nya memanfaatkan kemampuan penggunaan teknologi dan media sosial mampu menjadikan gerakan menjadi gelombang yang masif karena informasi terdistribusi dengan cepat dan menjangkau banyak masyarakat.

Gerakan Gen-Z di Nepal

Pemicu pergerakan Gen Z pada 8 September 2025 di Nepal adalah kebijakan menutup semua *platform* media sosial yang tidak terdaftar, memblokir total 26 aplikasi media sosial.

Latar Belakang sosial-ekonomi yang kompleks membuat eskalasi pergerakan luas menurut Aryal (2025)¹, yaitu:

1. **Korupsi.** Indeks Persepsi Korupsi Transparency International sangat rendah (peringkat 107 dari 180 negara). Selain itu, Financial Action Task Force (FATF) — organisasi internasional yang dibentuk untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi — telah menempatkan Nepal dalam “daftar abu-abu”.
2. **Nepo-Kids Flexing.** Salah satu pemicu utama frustrasi publik adalah fenomena "anak-anak nepo" yang memamerkan kekayaan mereka di media sosial. Mereka bukanlah anak dari keluarga pengusaha mapan, juga tidak diketahui mewarisi kekayaan yang signifikan. Hal ini membuat Gen Z mempertanyakan bagaimana mereka mampu menikmati gaya hidup mewah dan pendidikan berkualitas tinggi di luar negeri. Kekhawatiran ini menyebar dengan cepat di dunia maya, dengan tagar seperti #nepokids dan #nepobabies menjadi tren di berbagai *platform*, melambungkan kebencian terhadap privilese dan korupsi.
3. **Instabilitas Politik.** Sejak penghapusan monarki pada tahun 2008, Nepal telah mengalami 14 pemerintahan yang berbeda, dan tidak satu pun dari mereka yang menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh. Seringnya

¹ Niroj Aryal. 2025. Nepal in Turmoil: Gen Z Protest, Political upheaval, and the Quest for Reform. Social Science Research Network.

pergantian perdana menteri telah menciptakan suasana kepemimpinan yang berganti-ganti, yang melemahkan kontinuitas dan stabilitas kebijakan. Lebih lanjut, ketiadaan oposisi parlemen yang kuat dan konsisten semakin melemahkan sistem pengawasan dan keseimbangan.

4. **Kurangnya Kesempatan Bekerja.** Berdasarkan data terbaru yang tersedia, sekitar 12,6 persen pemuda Nepal menganggur dan aktif mencari kesempatan kerja. Situasi ini telah mendorong sejumlah besar pemuda untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Faktanya, sekitar 500.000 pekerja Nepal meninggalkan negara itu setiap tahun untuk bekerja di luar negeri. Remitansi dari para pekerja migran ini merupakan bagian substansial dari perekonomian Nepal, menyumbang sekitar 26,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut pada 2023. Ketergantungan pada remitansi ini menggarisbawahi terbatasnya kesempatan kerja domestik yang tersedia. Kelangkaan prospek pekerjaan lokal telah menyebabkan beberapa individu mempertimbangkan langkah-langkah ekstrem, seperti berpartisipasi dalam konflik di luar negeri, dalam mencari pekerjaan. Tren ini menyoroti parahnya masalah pengangguran di kalangan pemuda Nepal.

Gen-Z dan Partisipasi Politik di Nepal

Kumar (2025)² menyebutkan bahwa Generasi Z Nepal merupakan kekuatan penting dalam membentuk wacana demokrasi kontemporer. Keterlibatan mereka mencerminkan pergeseran dari politik tradisional menuju aktivisme partisipatif, berbasis nilai, dan dimediasi digital. Meskipun terdapat peluang dalam hal kesadaran, mobilisasi, dan inovasi, tantangan seperti hambatan kelembagaan, defisit kepercayaan, dan keterbatasan sosial-ekonomi tetap ada.

Lebih lanjut Kumar (2025) merekomendasikan bahwa para pembuat kebijakan dan lembaga politik harus menyadari potensi Generasi Z dengan menciptakan *platform* inklusif, mempromosikan pendidikan kewarganegaraan, dan memfasilitasi partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Di negara-negara demokrasi transisi seperti Nepal, keterlibatan berkelanjutan Generasi Z dapat mendefinisikan ulang hakikat tata kelola demokrasi, menjadikannya lebih responsif, inklusif, dan mahir dalam teknologi.

Pelajaran untuk Indonesia

² Vikas kumar. 2025. The role of Gen Z in shaping Nepal's democratic discourse: Opportunities and challenges. International Journal of Humanities and Social Science Research. Volume 11, Issue 5, 2025, Page No. 153-155. www.socialsciencejournal.in

- Gen-Z punya minat terhadap partisipasi politik yang dipengaruhi oleh penguasaan teknologi dan *engagement* yang tinggi pada sosial media sehingga arus informasi mudah dan cepat di dapat atas kejadian yang aktual.
- Pengekangan terhadap akses komunikasi dengan media digital direpresentasikan sebagai upaya pembungkaman suara dalam bentuk baru yang tidak sesuai dengan karakter generasi Z.
- Pentingnya mendorong pemerataan kesejahteraan.
- Kepercayaan pada Pemerintah merupakan hal utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi domestik sehingga tata kelola yang baik dan transparansi dibutuhkan pada era keterbukaan seperti saat ini.

BAB II

INFORMALITAS DAN KETENAGAKERJAAN

Saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius ketenagakerjaan di tengah target Asta Cita pemerintah yang menekankan penguatan SDM dan penciptaan kerja layak. Meskipun tingkat pengangguran menurun, kualitas pekerjaan memburuk dengan dominasi informalitas, meningkatnya pekerja tidak penuh, dan pelebaran kesenjangan keterampilan akibat *mismatch* pendidikan. Percepatan ekonomi digital pasca pandemi memicu tumbuhnya pekerja *platform* yang bekerja dalam pola kemitraan semu: jam kerja panjang, pendapatan tidak stabil, serta minim perlindungan sosial. Informalisasi ini menimbulkan risiko ekonomi, sosial, dan politik yang semakin kompleks, sementara kekosongan regulasi memperburuk kerentanan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan ‘reformasi’ ketenagakerjaan melalui perluasan pekerjaan formal, regulasi komprehensif bagi pekerja *platform*, serta penguatan jaminan sosial yang inklusif, agar transformasi ekonomi tidak menghasilkan pertumbuhan tanpa kesejahteraan.

2.1. Asta Cita dan Polemik Tuntutan Kerja Layak

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi target ambisius di tengah realisasi pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai di kisaran 5 persen. Pemerintahan Prabowo-Gibran menaruh harapan Asta Cita dengan fokus untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Ada 3 misi yang erat dengan isu ini antara lain misi 3, misi 4 dan misi 6. *Pertama*, dalam misi 3 disebutkan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. *Kedua*, dalam misi 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. *Ketiga*, melalui misi 6 yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Target ini memiliki benang merah penguatan tenaga kerja dan

penciptaan kerja layak (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025).

Tentu saja tidak mudah mewujudkan 3 misi tersebut, masih banyak tantangan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Bahkan Agustus lalu, muncul kritik keras masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi pada bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kritik ini awalnya dilatarbelakangi oleh adanya pemotongan anggaran dan ketimpangan anggaran lembaga untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga meninggalnya *driver* ojek *online* saat mengantarkan pesanan di tengah kerumunan unjuk rasa. Hal ini juga diperparah dengan etika petinggi dewan yang dinilai tidak etis dalam menggunakan anggaran di tengah fiskal terhimpit. INDEF, The Prakarsa, dan CORE Indonesia pun menyuarakan pernyataan sikap dan menekankan bahwa fenomena gelombang demonstrasi ini merupakan cerminan kegagalan fundamental dalam pengelolaan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia (CORE Indonesia, INDEF, dan The Prakarsa, 2025). Ketiga lembaga ini mendesak reformasi fiskal yang adil, transparan, serta memberikan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat dan perlindungan pekerja. Dari kritik ini diharapkan ada perlindungan komprehensif pekerja dan masyarakat yang telah terdampak.

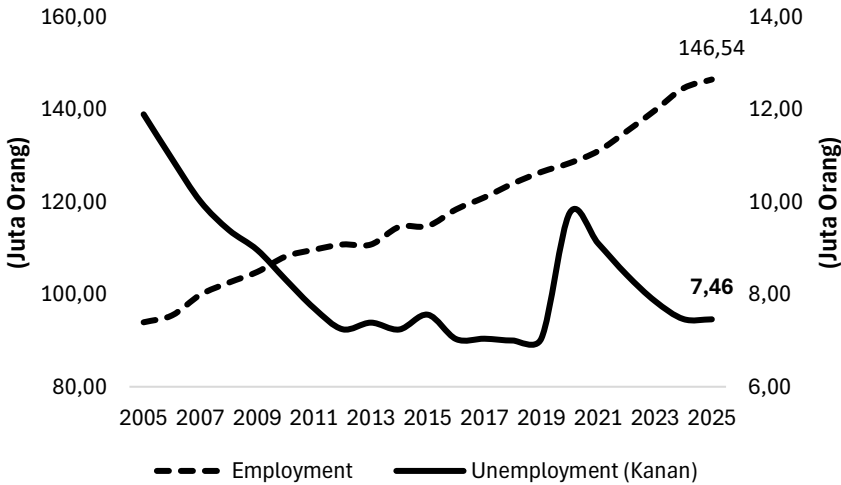
Lebih lanjut, desakan ini untuk menciptakan kerangka kerja untuk menjamin upah dan jam kerja yang layak termasuk keselamatan kerja. Tentu ini memerlukan regulasi yang selevel dengan UU untuk perlindungan dan kesejahteraan *platform* digital dalam skema tripartit (pemerintah-perusahaan, *platform*-pekerja). Integrasi yang lebih luas para pekerja ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, termasuk 4,6 juta pekerja *platform* digital, dengan mekanisme kontribusi yang proporsional. Selain itu, pemerintah perlu menjalankan program Padat Karya Tunai secara masif secara nasional yang menyasar angkatan kerja muda, angkatan kerja yang ter-PHK, dan kelompok pengangguran lainnya. Terakhir, akselerasi kepastian hukum yang mengintegrasikan standar bisnis, HAM, dan lingkungan untuk menciptakan investasi yang menjamin perlindungan hak masyarakat dan kelestarian ekologis demi pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan.

Mendesaknya tuntutan ini juga diiringi pesatnya pekerja informal berbasis *web-based* atau lokasi yang regulasinya belum diatur. Dalam menyelesaikan tantangan ini, pemerintah dituntut responsif karena urgensi SDM menjadi indikator utama 2025, Indonesia cerah karena pengelolaan yang berhasil atau lelah karena beban berat akibat tidak mampu menangkap bonus demografi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

2.2. Kondisi Ketenagakerjaan Terkini

Tren angkatan kerja 15 tahun ke atas menunjukkan peningkatan dari 93,96 juta orang pada 2005 meningkat menjadi 146,54 juta orang pada 2025. Angka pengangguran sempat mengalami fluktuasi yang dimulai 11,90 juta pada 2005, mengalami stabilitas hingga 2019, lalu meningkat tajam pada 2020-2021 yang diakibatkan oleh tidak siapnya menghadapi pandemi. Hingga saat ini angka pengangguran tercatat mengalami tren penurunan dari 2021 hingga 2025 (7,46 juta orang).

Gambar 2.1. Tren Orang Bekerja dan Pengangguran, 2005-2025

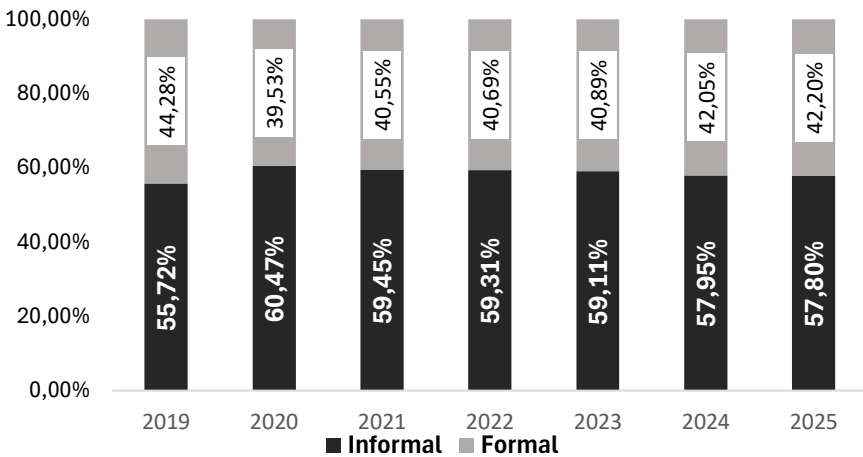


Sumber: BPS, 2025

Sekitar 146,54 juta orang angkatan kerja, sektor informal mendominasi pada triwulan III 2025 sebanyak 57,8 persen. Jika dilihat dari strukturnya dominasi pekerja informal yang terjadi sejak 2019 dengan kenaikan atau

penurunan yang tidak signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai indikator tenaga kerja yang belum terserap pasar kerja mengalami penurunan dari 4,91 persen pada Agustus 2024 menjadi 4,85 Agustus 2025. Angka ini seharusnya memberikan sinyal yang baik karena penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja meningkat. Lebih lanjut, pada bulan Agustus 2025 TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan porsi 8,63 persen masih menjadi yang tertinggi dan TPT terendah berada di tingkat pendidikan SD sebesar 2,3 persen.

Gambar 2.2. Tren Pekerja Formal dan Informal, 2019-2025



Notes:
Kondisi Tenaga Kerja Periode Agustus

Sumber: BPS, 2025

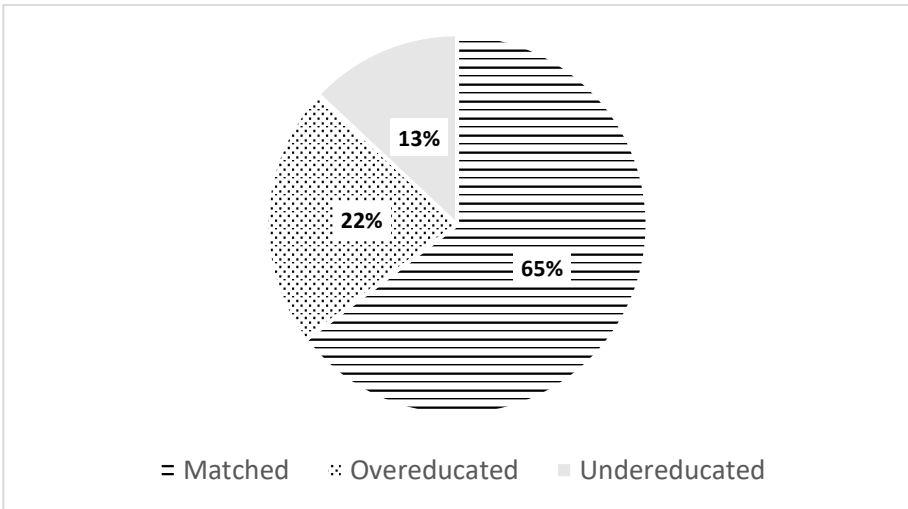
Namun demikian, penurunan TPT bersifat semu karena data lainnya menunjukkan bahwa ada indikasi penurunan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja informal. Saat ini terdapat 146,54 juta orang yang bekerja dengan pekerja penuh, meningkat hanya 0,20 juta orang dari 98,45 juta menjadi 98,45 juta. Sementara pekerja tidak penuh yang termasuk di dalamnya setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu meningkat dari 46,19 juta menjadi 47,89 juta orang (yoy). Untuk pekerja paruh waktu peningkatannya sebesar 24,77 persen atau dari 34,63 juta orang menjadi 36,29 juta orang. Kemudian porsi penambahan pekerja tidak penuh yang lebih besar, hal ini menandakan produktivitas pekerja menurun dengan

semakin banyaknya jumlah jam kerja yang menurun. Sedikitnya jumlah jam kerja ini tentu memiliki implikasi pada upah yang juga menurun.

2.3. Tantangan Struktural Ketenagakerjaan

Struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi pekerja informal. Masalah struktural yang umum terjadi adalah *job mismatch* yang terjadi di saat kualifikasi pendidikan, keterampilan, dan minat tidak sesuai dengan pekerjaan. Keterampilan yang dibutuhkan industri yang berkembang cepat namun tidak dibarengi dengan lulusan yang mumpuni semakin sedikit serta waktu pendidikan. Hal ini jika dibiarkan terlalu lama, akan berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja karena pendapatan yang diterima bisa lebih kecil, sehingga dalam jangka panjang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sementara ILO melihat ini sebagai sebuah kondisi struktural di pasar kerja di mana tingkat pendidikan formal yang dimiliki seorang pekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang secara umum dibutuhkan untuk pekerjaannya (ILO 2022). Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 64,64 persen pekerja muda yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sementara 22,36 persen mengalami *overeducated* dan 13 persen yang *matched*.

Gambar 2.3. Presentase Pekerja Pemuda Berdasarkan *Mismatch*, 2024



Sumber: ILO dalam BPS, 2024

Berdasarkan gambar di atas persentase pekerja pemuda yang *over educated* ada 22,36 persen. *Overeducated* ini berimplikasi pada upah yang lebih rendah dari seharusnya karena *miss matched*. Sebagai contoh, ada pekerja dengan ijazah S1 tapi untuk ke pekerjaan itu sebenarnya cukup dengan tingkat pendidikan SMP. Pekerja ini akan menggunakan ijazah SMP dengan upah selevel ijazah SMP. Oleh karena itu, dibutuhkan revitalisasi kurikulum pendidikan dengan bekerja sama dengan industri sehingga mengetahui perkembangan secara langsung dan fokus pada keterampilan yang dibutuhkan industri. Selain itu, peningkatan keterampilan melalui pelatihan berbasis keterampilan atau pemagangan juga perlu. Dalam Paket Ekonomi 8+4+5 tahun ini, pemerintah memiliki Program Magang Nasional Gelombang II dengan kuota peserta 80 ribu dari seluruh Indonesia. Meskipun dari sisi besaran target bisa dikatakan ini masih terbatas, namun dari sisi semangat untuk mengurangi *gap* antara kebutuhan dunia usaha dan kemampuan teknis akademis program ini jika diimplementasikan dengan baik maka berpeluang mereduksi *mismatch* yang terjadi selama ini.

Tantangan ketenagakerjaan selanjutnya adalah mempertemukan ekspektasi industri dengan preferensi budaya kerja generasi muda, khususnya Gen Z. Di satu sisi, Gen Z memiliki adaptasi yang baik dalam hal teknologi karena merupakan *tech native*. Di sisi lain, Gen Z ini kecenderungannya tidak berambisi pada pekerjaan formal, tapi justru lebih memiliki pekerjaan yang sesuai dengan *value* hidupnya (seperti *work life balance*, dst.). Gen Z dihadapkan dengan pilihan beragam jenis pekerjaan baru seperti *influencer* sosial media, atau *Key Opinion Leader*, *streamer*, analis bisnis, dan masih banyak lagi. Ragam pekerjaan yang bersifat *ad hoc* ini menuntut *skill* yang dinamis dari para pekerjanya, sehingga kemampuan negara untuk memberi ruang tumbuh bagi ekosistem kerja yang dinamis sangat diperlukan.

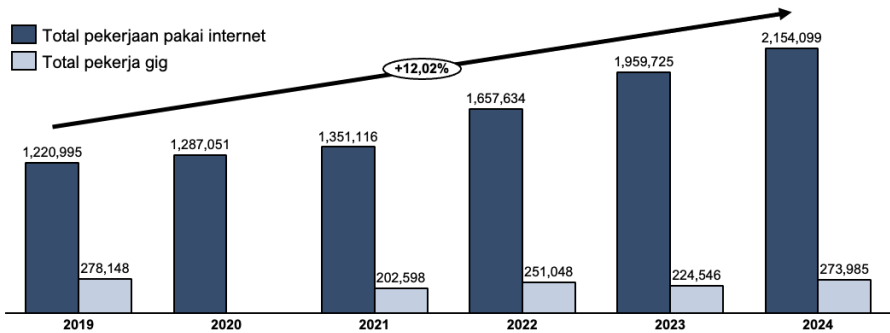
2.4. Krisis Pekerjaan Layak dan Kekosongan Kebijakan

Para calon tenaga kerja mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan formal karena minimnya pekerjaan layak yang tersedia. Kondisi ini diperparah oleh situasi Pandemi Covid-19, yang membuat perekonomian sempat tumbuh negatif dan hingga saat ini dalam proses pemulihan. Sebaliknya, ekonomi digital justru mengalami percepatan karena Covid-19. Hal ini terlihat dari

semakin terbiasanya masyarakat beradaptasi dengan teknologi digital yang memunculkan pengguna baru. Transaksi tersebut meliputi investasi digital, dompet digital, penggunaan QRIS, pengguna belanja digital. Implikasi meningkatnya ekonomi digital ini salah satunya adalah semakin pesatnya pekerja informal khususnya di bidang kurir.

Dampak lainnya juga terlihat dari semakin besarnya komposisi pekerjaan yang menggunakan internet. Pekerjaan yang melibatkan internet kian meningkat dari 2019 sebanyak 1.220.995 pekerjaan dan meningkat hingga 2024 sebanyak 2.154.009 (BPS, 2025). Sementara itu, situasi pekerja *platform* sebenarnya belum pulih kembali pada posisi sebelum Covid-19, di mana pada 2019 mencapai 278 ribu pekerja dan pada 2024 sebesar 273 ribu pekerja.

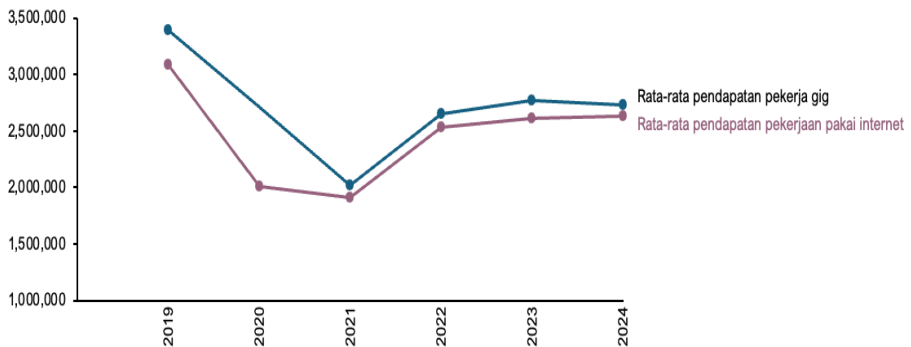
Gambar 2.3. Total Pekerja Gig & Pekerjaan Memakai Internet



Sumber: BPS-Sakernas, 2025

Pekerja *platform* atau *gig worker* memiliki ciri yaitu pekerjaan yang memanfaatkan akun internet. Dari berbagai jenis pekerjaan *gig* tersebut, terdapat satu dari lima pekerja dengan 30 persen upah premium (Seitz, 2025) yang sangat bagus untuk menghasilkan pekerjaan yang layak. Namun sayangnya, belum semua jenis pekerjaan *gig* menjadi sumber pekerjaan layak. Oleh karena itu, kepastian regulasi yang menjamin layaknya pekerjaan dan tumbuhkembangnya ekosistem industri yang ada di dalamnya sangat diperlukan.

Gambar 2.4. Pertumbuhan Rata-Rata Pendapatan Pekerja Gig & Pekerjaan Pakai Internet



Sumber: BPS-Sakernas, 2025

Fenomena ketenagakerjaan Indonesia menghadapi kerentanan yang semakin kompleks, terutama terkait waktu kerja, struktur pendapatan, dan perlindungan sosial. Banyak pekerja informal maupun pekerja *platform* bekerja dalam kondisi yang tidak stabil, di mana jam kerja panjang, upah rendah, serta minimnya dukungan jaringan sosial menjadi masalah utama. Pekerja *platform*, yang awalnya diharapkan menjadi jembatan menuju kesempatan kerja baru, kini mengalami pergeseran struktural mulai dari hubungan kerja formal menuju pola kemitraan ‘semu’ yang mengaburkan batas antara pekerja mandiri dan pekerja bergantung. Walaupun fleksibilitas jam kerja menjadi nilai tambah, sebagian besar dari mereka justru bekerja lebih lama dibanding pekerja formal, bahkan mencapai lebih dari tiga belas jam per hari. Pola kerja yang tersegregasi waktu seperti mulai dari pekerja dini hari hingga pekerja malam. Kondisi ini menggambarkan ritme kerja yang tidak selalu kompatibel dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja (INDEF, 2025). Pendekatan peraturan alternatif yang memastikan berkembangnya industri dan kesejahteraan pekerja *platform* sangat diperlukan guna menaungi keseluruhan ekosistem dapat sejahtera bersama dalam model hubungan kerja yang bisa dikatakan baru ini.

Di sisi perlindungan sosial, pekerja *platform* dan sebagian besar pekerja informal menghadapi kondisi yang lebih rentan. Mereka kerap tidak tercatat dalam sistem bantuan sosial negara, khususnya mereka yang sebelumnya

bekerja dalam sektor formal namun kemudian berpindah ke pekerjaan digital atau informal. Akses terhadap sistem jaminan sosial seperti asuransi kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan pensiun sepenuhnya bergantung pada pendaftaran sukarela. Tidak adanya mekanisme keikutsertaan otomatis menyebabkan tingkat cakupan perlindungan sosial menjadi sangat rendah. Selain itu, tidak semua pekerja *platform* memiliki akses terhadap serikat atau jaringan kolektif, sehingga ketika menghadapi sengketa atau persoalan dengan perusahaan, posisi tawar mereka sering kali sangat lemah.

Informalisasi pekerjaan membawa dampak multidimensional bagi pekerja. Dari sisi ekonomi, mereka menghadapi ketidakpastian pendapatan, tingginya risiko pendapatan harian yang fluktuatif, serta tanggung jawab biaya operasional yang sepenuhnya ditanggung sendiri karena status kemitraan. Hilangnya jaminan sosial semakin memperburuk ketidakstabilan penghasilan. Dari perspektif politik, mereka kehilangan ruang untuk berserikat dan bernegosiasi secara kolektif. Fragmentasi pekerja melalui pengaturan algoritma di *platform* membuat solidaritas pekerja sulit terbentuk. Sementara itu, dari sisi sosial, ketidakpastian kesejahteraan dan sulitnya merencanakan masa depan menjadi beban psikologis yang signifikan. Jam kerja yang panjang, tekanan kinerja berbasis algoritma, dan tingginya tingkat fleksibilitas semu berpotensi mendorong kelelahan kronis yang berdampak pada kesehatan jangka panjang.

Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan bahwa informalisasi yang terjadi bukan sekadar pergeseran bentuk pekerjaan, tetapi transformasi struktural yang membutuhkan respons kebijakan menyeluruh. Tanpa regulasi yang melindungi pekerja digital dan informal, perekonomian Indonesia berisiko menciptakan pertumbuhan yang tidak inklusif di mana perluasan kesempatan kerja tidak diikuti oleh jaminan kesejahteraan yang memadai. Dengan jelasnya aturan, kondisi ideal bagi pekerja, bagi *platform*, dan pembuat kebijakan. Dalam jangka panjang, kualitas pekerjaan akan menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan transformasi ekonomi ke depan.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program untuk pekerja informal sebagai kategori bukan penerima upah. Realisasi penambahan peserta baru 2024 mencapai 83,95 persen dari target 11.850.000 peserta

(BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Dengan jumlah tenaga kerja sektor informal yang mendominasi dan kontribusinya terhadap jumlah penduduk yang bekerja juga besar, sayangnya partisipasi dalam program jaminan sosial masih rendah. Jumlahnya hanya sekitar 9 persen dari total potensi pekerja informal (Kompas, 2024). Selain karena aspek fluktuasi pendapatan, rendahnya partisipasi ini disebabkan karena minimnya informasi manfaat jaminan sosial bagi mereka sehingga membayar iuran tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu menangkap potensi kepesertaan pekerja informal terutama pekerja informal yang rentan. Jika tidak, tantangan bonus demografi pada 2045 bisa menjadi bom waktu dan beban bantuan sosial yang lebih besar.

Last but not least, pemerintah dan para pemangku kebijakan lainnya bisa belajar dari pengalaman negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Rwanda dalam hal mengelola pekerja *platform* dan penguatan jaminan sosial ke depan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perbandingan Regulasi dan Skema untuk Pekerja Platform

Aspek	Malaysia	Singapura	Rwanda
Regulasi Pekerja Platform	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Malaysia mengesahkan Gig Workers Bill 2025, sebuah regulasi komprehensif yang mengatur hubungan kemitraan, struktur kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan platform. - Pekerja platform diakui sebagai pekerja khusus (INDEF, 2025). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah mengeluarkan Platform Workers Act 2024 sebagai regulasi yang menekankan fleksibilitas kerja - Pekerja platform diakui sebagai kategori pekerja baru dan hak menyerupai pekerja formal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rwanda tidak memiliki aturan khusus pekerja platform.
Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Skema Self-Employment Social Security Scheme (SESSS) dan program 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Platform</i> wajib menyeter kontribusi (Central Provident Fund) CPF 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan sosial diberikan melalui program Ejo Heza, yaitu skema

	<p>pensiun i-Saraan KWSP, yang memungkinkan pekerja menabung untuk jangka panjang serta mendapatkan perlindungan kecelakaan dari SOCSO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iuran sosial oleh antara pekerja dan <i>platform</i> untuk skema asuransi kecelakaan SOCSO. - Program i-Saraan melakukan kerja sama dengan Grab 	<p>untuk pensiun dan kesehatan dengan skema bertahap. Perlindungan kecelakaan kerja berlaku sama seperti karyawan formal</p>	<p>tabungan jangka panjang berskala nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada skema menyediakan insentif/top up dari pemerintah - Ada manfaat tambahan seperti asuransi kematian dan pemakaman. - Perubahan perilaku masyarakat menabung
Representasi dan dialog sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Ada dewan konsultasi tripartit yang melibatkan perwakilan pemerintah, perusahaan <i>platform</i>, dan asosiasi pekerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Platform Workers Representative Body</i>, yaitu lembaga representatif dalam struktur tripartit nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat lembaga representasi pekerja <i>platform</i> yang khusus. Keterlibatan pekerja dalam dialog sosial lebih bersifat umum sebagai bagian dari sektor informal.

Sumber: (INDEF, 2025)

2.5. Penutup

Untuk mengatasi masalah informalitas ketenagakerjaan dan terjadinya krisis pekerjaan layak di Indonesia, maka beberapa langkah berikut perlu menjadi fokus utama kebijakan demi memastikan kesejahteraan keseluruhan ekosistem yang menaungi “ekonomi *platform*” ini.

1. Perluasan peluang pekerjaan formal dan *link and match* yang bekerjasama dengan industri guna mengurangi *mismatch*. *Reskilling* dan *upskilling* sangat diperlukan pada sektor yang paling berdampak pada distribusi pertumbuhan ekonomi, seperti pada industri pengolahan.

2. Mengisi kekosongan kebijakan dengan mendesak RUU Pekerja *Platform*. Dalam hal ini perlu diatur aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Aspek hukum meliputi, hak berserikat dan berorganisasi serta dialog sosial dan hubungan kemitraan yang setara. Aspek sosial meliputi jaminan dan perlindungan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, dan fleksibilitas waktu kerja. Aspek ekonomi yang meliputi jaminan sosial, kejelasan hubungan antara pekerja *platform* dan perusahaan *platform*, transparansi dan keadilan upah. Kesemuanya dibangun di atas semangat untuk tetap membuat iklim bisnis industri *platform* atraktif dan berkembang, serta pekerja yang tersejahterakan.

3. Penguatan perlindungan sosial dengan skema yang menguntungkan bagi kepesertaan pekerja informal dan perluasan akses informasi dan layanan. Di sini perbaikan tata kelolanya perlu dilakukan secara *out of the box*, misalnya BPJS perlu melibatkan *key opinion leader* atau selebriti sosial media untuk menyebarkan akses informasi, mengingatkan masyarakat Indonesia menggunakan HP lebih dari 7 jam dan pengguna aktif sosial media.

BAB III

RESENTRALISASI DAN STAGNASI KETIMPANGAN WILAYAH

Melemahnya semangat desentralisasi fiskal dan meningkatnya kembali kecenderungan sentralisasi kewenangan dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan utama dalam memastikan pemerataan pembangunan daerah di Indonesia. Perubahan regulasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja telah menarik sejumlah kewenangan penting dari pemerintah daerah ke pusat, mengikis kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya dan memperkuat kemandirian fiskal. Akibatnya, banyak daerah kini bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) yang porsinya terus menurun terhadap total belanja negara, memperdalam kesenjangan fiskal antarwilayah. Analisis terhadap Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), transfer fiskal, dan PDRB per kapita menunjukkan pola ketimpangan yang tajam antara wilayah kaya sumber daya dan wilayah tertinggal, serta antara Jawa dan luar Jawa. Meskipun pemerintah pusat menawarkan solusi berupa pinjaman daerah melalui PP 38/2025, kebijakan ini justru berisiko memperkuat ketergantungan fiskal dan melemahkan otonomi daerah. Karena itu, strategi korektif mendesak diperlukan: mulai dari memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui diversifikasi PAD, pemerataan transfer fiskal berbasis kebutuhan dan kemiskinan, serta sinergi pusat-daerah untuk mendorong ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan.

3.1. Resentralisasi Regulasi

Otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia. Sebab, pembangunan yang terpusat selama orde baru dianggap semakin memperlebar kesenjangan antar daerah. Maka, reformasi mengamanatkan agar sejumlah kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat agar didelegasikan kepada pemerintah daerah (pemda), baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Harapannya, pelayanan publik dapat lebih dekat dan pembangunan bisa lebih baik dirasakan oleh masyarakat di daerah. Selain itu, reformasi juga mengamanatkan agar adanya desentralisasi

fiskal diperkenalkan sebagai instrumen pada sisi fiskal yang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antar daerah tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar tiap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih selaras dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing.

Namun, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagai salah satu amanat reformasi perlahan-lahan semakin terkikis karena adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Arah sentralisasi tersebut setidaknya telah dimulai ketika terdapat perubahan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba (UU Minerba) dan dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Berdasarkan perbandingan pada UU nomor 4 tahun 2009, UU Minerba pada tahun 2020 tersebut mengalihkan sejumlah kewenangan dari pemda atau kewenangan bersama antara pemda dan pemerintah pusat menjadi sepenuhnya pemerintah pusat di antaranya dalam enam aspek, yakni:

1. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
2. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)
3. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan
4. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
5. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada BUMD atau BUMN
6. Pengelolaan atau pemungutan secara langsung terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minerba

Implikasinya, **pemerintah daerah menjadi terdisinsentif untuk mendorong investasi di sektor mineral dan batubara dan meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Sebab, penarikan kewenangan tersebut menyebabkan berkurangnya motivasi daerah untuk aktif mengawasi, memfasilitasi, atau mengembangkan kegiatan tambang secara produktif**

dan berkelanjutan. Sebagai contoh, ruang fiskal yang sebelumnya bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan tambang, program pemberdayaan masyarakat, dan pemulihan lingkungan menjadi lebih sempit. Hal tersebut mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk memitigasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan.

Selain itu, potensi sumber penerimaan daerah, khususnya bagi daerah penghasil mineral dan batubara, menjadi berkurang karena semakin terbatasnya **kewenangan pemda dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan pendapatan dari sektor strategis**. Dengan hilangnya sebagian penerimaan langsung dari sektor Minerba, pemda semakin **bergantung pada dana Transfer Ke Daerah (TKD)**, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba. Ketergantungan tersebut akan mengurangi fleksibilitas pemda dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal.

Kemudian, UU Cipta Kerja turut menarik kewenangan dari pemda atau kewenangan bersama antara pemda dan pemerintah pusat menjadi sepenuhnya pemerintah pusat di antaranya dalam enam aspek, yaitu:

Tabel 3.1. Deregulasi Kewenangan Pemerintah Daerah

No	Aspek	Poin Aspek
1	Perizinan usaha dan investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha dasar seperti izin usaha dan nomor induk berusaha b. Penentuan kategori risiko usaha c. Penetapan standar dan norma teknis sektor usaha
2	Perizinan dan pengawasan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan AMDAL untuk kegiatan lintas provinsi atau strategis nasional b. Pengawasan dan sanksi administratif atas kegiatan usaha berskala besar
3	Pertanahan dan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan dan perubahan rencana tata ruang nasional dan kawasan strategis nasional b. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS

4	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan formula upah b. Penetapan norma, standar, dan pengawasan ketenagakerjaan c. Perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
5	Pertambangan, kehutanan, dan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan kecenderungan sentralisasi pada UU Minerba, misalnya terkait penerbitan izin usaha pertambangan dan izin pemanfaatan hasil hutan
6	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan lokasi dan pelaksanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional b. Penyelesaian sengketa tanah dalam proyek strategis

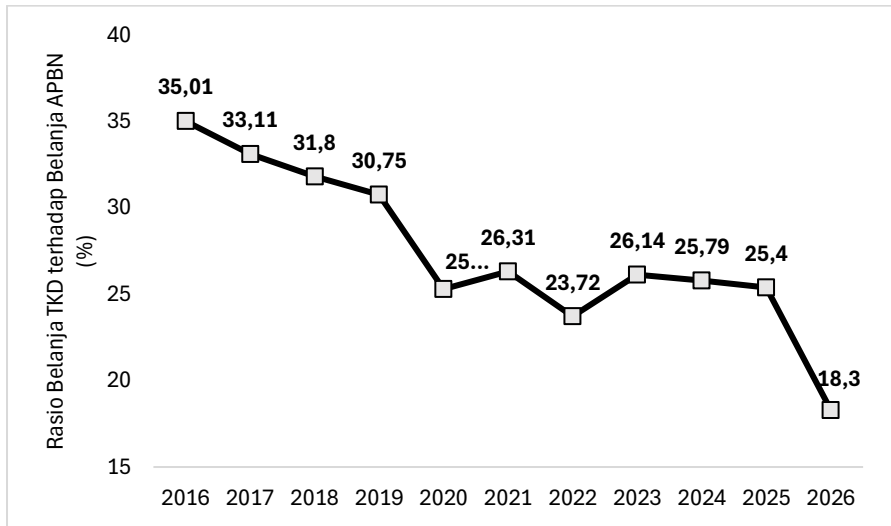
Sumber: diolah, INDEF

Dampaknya, sejumlah sumber penerimaan dari pajak dan retribusi perizinan, misalnya izin usaha dan izin lingkungan, tidak lagi menjadi sumber PAD bagi pemda. Jadi, penerima manfaat fiskal utama dari perizinan adalah pemerintah pusat. Padahal, beban penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang terkait perizinan tetap ditanggung oleh pemda. Hal ini berimplikasi pada terjadinya asimetris fiskal di mana pemerintah pusat mendapatkan manfaat fiskal, sementara pemda menanggung biaya pelayanan tambahan. Pada akhirnya, penarikan kewenangan ke pemerintah pusat pada UU Cipta Kerja semakin membuat turunnya kemampuan pemda untuk menyesuaikan kebijakan fiskalnya terhadap dinamika perekonomian di tingkat lokal.

3.2. Transfer Ke Daerah

Kecenderungan sentralisasi semakin menguat pada 2026 mendatang. Hal ini tercermin dari semakin kecilnya anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) dibandingkan dengan total belanja dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada 2026, total anggaran TKD adalah sebesar Rp 693,0 Triliun (pembulatan). Sedangkan total anggaran belanja dalam APBN 2026 berjumlah Rp 3.842,7 Triliun. Artinya, rasio belanja TKD terhadap total belanja APBN 2026 hanya sebesar 18,3 persen.

Gambar 3.1. Rasio Transfer ke Daerah terhadap Belanja Negara dalam APBN, 2016 s.d. 2026 (persen)



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Pada Gambar 3.1 tersebut, terlihat bahwa tren penurunan rasio TKD terhadap total belanja negara telah terjadi sejak 2016. Pada saat itu, rasio berada pada angka 35 persen. Namun, rasio angka tersebut menurun secara perlahan hingga 2019 mencapai angka 30,75 persen dan anjlok ke 25,29 persen pada 2020. Berikutnya, rasio tersebut tidak mengalami kenaikan kembali seperti pada waktu sebelum pandemi dalam lima tahun terakhir. Bahkan, angka rasio TKD terhadap belanja negara dalam APBN semakin merosot ke 18,3 persen pada APBN 2026 mendatang atau hampir separuh dari rasio satu dekade yang lalu.

Tren ini menimbulkan kekhawatiran terhadap **kemampuan daerah membiayai pelayanan publik dan pembangunan lokal**. Sebagai gambaran, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa terdapat 104 kabupaten dan 33 kota di seluruh Indonesia yang belum memenuhi kebutuhan belanja minimum untuk 10 urusan wajib dan belanja mengikat sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di samping itu,

terdapat 76 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bima, yang sudah memenuhi belanja wajib, tetapi belum mampu menutupi belanja mendesak³.

Maka, berkurangnya porsi TKD dapat memperlebar kesenjangan fiskal antar wilayah, terutama bagi daerah yang masih bergantung tinggi pada transfer pusat. Kondisi ini berpotensi mendorong **pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan alternatif**, terutama dari **pajak daerah dan retribusi daerah**, guna menutupi berkurangnya dana transfer dari pusat. Ketika dukungan fiskal dari pemerintah pusat melemah, pemda akan terdorong memperluas basis pajak lokal, menaikkan tarif pajak tertentu, atau menciptakan jenis retribusi baru. Terlebih, terdapat kebutuhan belanja publik yang terus meningkat. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil dan efisien, langkah ini dapat menambah beban masyarakat dan dunia usaha di daerah, serta memperlebar kesenjangan antar wilayah.

Dalam hal ini, terdapat setidaknya dua upaya *quick wins* yang pemerintah pusat dapat lakukan, setidaknya untuk memastikan TKD tersalurkan dengan cepat ke daerah, sehingga pembangunan di daerah dapat segera terlaksana. *Pertama*, pemerintah pusat harus memastikan penetapan petunjuk teknis berlangsung lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya sehingga pemda dapat lebih cepat pula menetapkan rencana kerja dan anggaran di daerahnya masing-masing. *Kedua*, pemerintah pusat agar dapat melakukan penyederhanaan syarat salur kepada pemda sehingga dapat meminimalkan proses birokrasi dan pada akhirnya mencegah adanya keterlambatan penyaluran TKD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

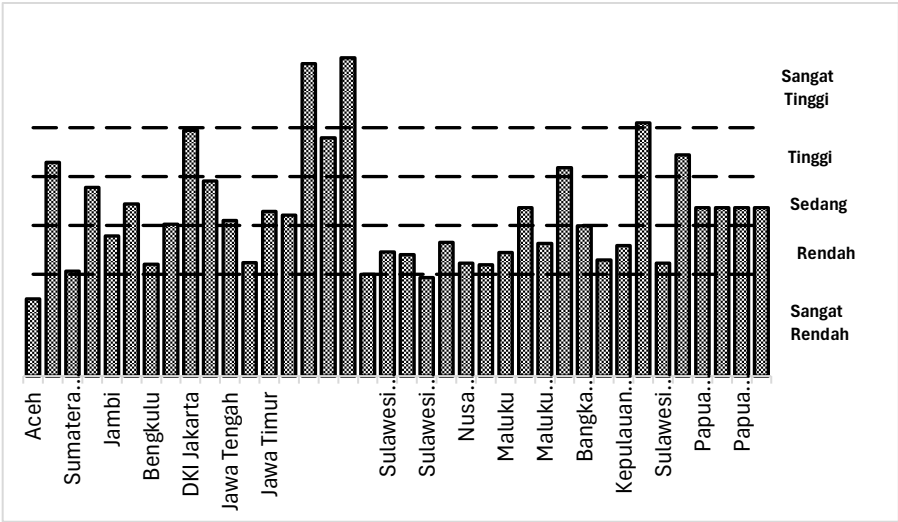
3.3. Kapasitas Fiskal Daerah

Dalam hal ini, disparitas fiskal secara horizontal perlu diperhatikan. Pada 2024 lalu, disparitas horizontal masih terlihat di berbagai daerah di Indonesia yang ditandai adanya kesenjangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) tiap provinsi. Rasio KFD ini menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian fiskal, dimana semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar kemampuan

³ <https://suarantb.com/2025/11/02/dprd-mendesak-pemkab-bima-jelaskan-alasan-keterlambatan-pembahasan-kua-ppas-2026/>

daerah mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Gambar 3.2. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Per Provinsi, 2024



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Pada Gambar 3.2 di atas menggambarkan kemampuan keuangan daerah di seluruh provinsi di Indonesia dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publiknya secara mandiri. Dari grafik terlihat adanya **ketimpangan yang signifikan antar daerah**. Beberapa daerah seperti **Kalimantan Utara, Jakarta, dan Kalimantan Timur** menempati kategori KFD **tinggi hingga sangat tinggi**. Hal tersebut menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat berkat kontribusi besar dari sektor industri, perdagangan, dan sumber daya alam. Sebaliknya, sebagian daerah lainnya, seperti **Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Barat**, berada pada kategori **rendah hingga sangat rendah**, menandakan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Sebagai tambahan, terdapat pola kategori KFD tiap provinsi per pulau besar di Indonesia berdasarkan data KFD 2024 tersebut pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

**Tabel 3.2. Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Tiap Provinsi
Per Pulau Besar, 2024**

Pulau Sumatera		Pulau Jawa		Pulau Kalimantan	
Provinsi	Kategori KFD	Provinsi	Kategori KFD	Provinsi	Kategori KFD
Aceh	Sangat Rendah	Banten	Tinggi	Kalimantan Barat	Sedang
Sumatera Utara	Tinggi	DKI Jakarta	Tinggi	Kalimantan Tengah	Sangat Tinggi
Sumatera Barat	Rendah	Jawa Barat	Sedang	Kalimantan Selatan	Tinggi
Riau	Sedang	Jawa Tengah	Sedang	Kalimantan Timur	Sangat Tinggi
Jambi	Rendah	DI Yogyakarta	Rendah	Kalimantan Utara	Tinggi
Sumatera Selatan	Sedang	Jawa Timur	Sedang		
Bengkulu	Rendah				
Lampung	Sedang				
Bangka Belitung	Rendah				
Kepulauan Riau	Rendah				

Pulau Bali-Nusa Tenggara		Pulau Sulawesi		Pulau Maluku-Papua	
Provinsi	Kategori KFD	Provinsi	Kategori KFD	Provinsi	Kategori KFD
Bali	Rendah	Sulawesi Utara	Rendah	Maluku	Rendah
Nusa Tenggara Barat	Rendah	Sulawesi Tengah	Rendah	Maluku Utara	Rendah
Nusa Tenggara Timur	Rendah	Sulawesi Selatan	Rendah	Papua	Sedang
		Sulawesi Tenggara	Sangat Rendah	Papua Selatan	Sedang
		Gorontalo	Rendah	Papua Tengah	Sedang
		Sulawesi Barat	Rendah	Papua Pegunungan	Sedang
				Papua Barat Daya	Sedang
				Papua Barat	Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat terlihat bahwa persebaran kategori KFD mengalami kesenjangan di mana seluruh provinsi pada pulau Bali dan Nusa Tenggara termasuk kategori rendah serta seluruh provinsi di pulau Sulawesi masuk ke dalam kategori sangat rendah dan rendah. Pada sisi lain, seluruh provinsi di pulau Kalimantan masuk ke dalam kategori sedang hingga sangat tinggi. Selain itu, mayoritas provinsi di pulau Sumatera juga masuk kategori sangat rendah dan rendah dengan pengecualian hanya pada provinsi Sumatera Utara yang memiliki kategori tinggi. Sebaliknya, mayoritas provinsi di pulau Jawa termasuk kategori sedang dan tinggi dengan pengecualian hanya pada provinsi DI Yogyakarta yang memiliki KFD dengan kategori rendah. Pada ujung timur Indonesia, kedua provinsi di kepulauan Maluku termasuk kategori KFD rendah dan seluruh provinsi di pulau Papua mempunyai kategori KFD yang sedang dan tinggi. Dengan demikian, intervensi kebijakan perbaikan KFD di masa mendatang dapat diarahkan dengan prioritas pada provinsi yang berada di pulau Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera (pengecualian di Sumatera Utara), dan kepulauan Maluku.

Sebagai catatan, pembangunan di enam provinsi yang terletak Papua juga harus diperhatikan pemerintah pusat walaupun sudah memiliki tingkat KFD yang sedang hingga sangat tinggi. Penyebabnya ialah pemerintah pusat baru melakukan pemekaran dari dua provinsi menjadi enam provinsi di Papua pada 2022 lalu. Implikasinya adalah pemerintah daerah di keempat provinsi baru tersebut masih membutuhkan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang baru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dana otonomi khusus Papua dari pemerintah pusat harus diarahkan untuk pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan, khususnya di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat sebagai keempat provinsi hasil pemekaran tahun 2022.

Tabel 3.3. Kategori Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Aceh, 2024

Kota/Kabupaten	Kategori KFD	Kota/Kabupaten	Kategori KFD
Kab. Aceh Barat	Rendah	Kota Sabang	Sedang
Kab. Aceh Besar	Rendah	Kota Langsa	Sedang
Kab. Aceh Selatan	Tinggi	Kota Lhokseumawe	Rendah
Kab. Aceh Singkil	Sangat Rendah	Kab. Gayo Lues	Sedang
Kab. Aceh Tengah	Sangat Rendah	Kab. Aceh Barat Daya	Sedang
Kab. Aceh Tenggara	Rendah	Kab. Aceh Jaya	Rendah
Kab. Aceh Timur	Sangat Rendah	Kab. Nagan Raya	Sedang
Kab. Aceh Utara	Rendah	Kab. Aceh Tamiang	Rendah
Kab. Bireuen	Rendah	Kab. Bener Meriah	Rendah
Kab. Pidie	Sangat Rendah	Kab. Pidie Jaya	Sedang
Kab. Simeulue	Sangat Rendah	Kota Subulussalam	Sedang
Kota Banda Aceh	Sedang		

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Selanjutnya, secara lebih detail, intervensi kebijakan kemandirian fiskal pada tingkat kabupaten/kota juga dapat diprioritaskan mulai dari provinsi yang memiliki kategori KFD sangat rendah. Sebagai contoh, provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang termasuk dalam kategori KFD sangat rendah memiliki 18 kabupaten dan 5 kota. Dari total 23 kabupaten/kota tersebut, hanya ada 1

kabupaten, yakni kabupaten Aceh Selatan, yang memiliki kategori KFD tinggi. Sebaliknya, 22 kabupaten/kota lainnya berada dalam kategori sangat rendah, rendah, dan sedang seperti terlihat pada Tabel 3.2. Jadi, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perbaikan kemandirian fiskal di Aceh pada masa mendatang.

Pada konteks ini, ketimpangan fiskal horizontal ini mencerminkan **tantangan desentralisasi fiskal di Indonesia**. Tantangan tersebut adalah masih banyak daerah, yakni sebanyak 18 provinsi yang masuk kategori KFD sangat rendah dan rendah, belum memiliki basis ekonomi dan sumber pendapatan yang cukup untuk menopang belanja daerah secara mandiri. Pada sisi lain, hanya terdapat 8 provinsi yang masuk kategori KFD tinggi dan sangat tinggi. Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas fiskal pada banyak daerah perlu diarahkan pada **diversifikasi sumber PAD**, penguatan tata kelola keuangan daerah, serta peningkatan investasi dan produktivitas ekonomi lokal.

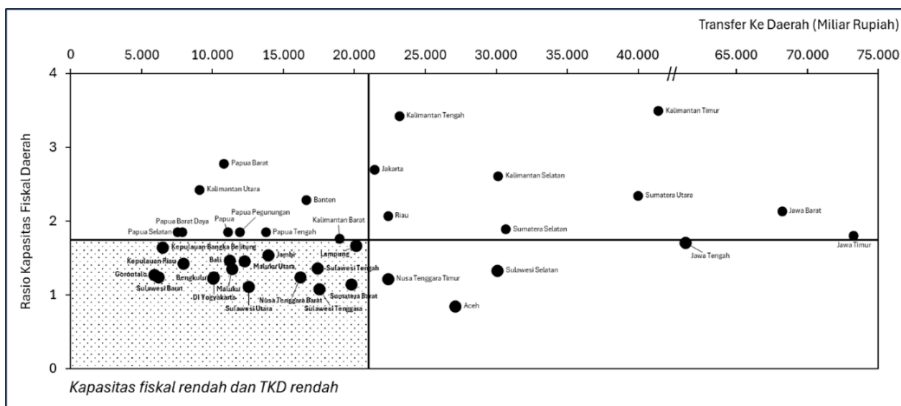
3.4. Kapasitas Fiskal Daerah dan Transfer Ke Daerah

Salah satu tujuan adanya TKD, khususnya melalui komponen Dana Alokasi Umum (DAU), adalah pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Pemerintah pusat cenderung mengalokasikan DAU yang lebih besar kepada pemda yang termasuk kategori KFD lebih rendah dibandingkan dengan pemda lainnya. Secara umum, KFD sebuah pemda cenderung lebih rendah karena minimnya tingkat PAD yang diterima oleh pemda tersebut. Jika KFD sebuah pemda turun ketika TKD, khususnya DAU, dari pemerintah pusat menurun, maka PAD dari pemda tersebut kemungkinan besar relatif rendah. Pasalnya, KFD dihitung berdasarkan total penerimaan daerah yang mencakup PAD dan dana TKD yang diterima oleh pemda tersebut.

Dalam hal ini, telaah atas rasio KFD dengan jumlah TKD yang diterima oleh sebuah pemda menjadi penting agar pemerintah pusat dapat mengetahui prioritas kebijakan terhadap pemda yang lebih membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat. Berdasarkan pemetaan atas rasio KFD dan nominal TKD pada 2024, dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah provinsi yang harus diprioritaskan oleh pemerintah pusat karena memiliki kapasitas fiskal rendah sekaligus dana TKD yang rendah. Sejumlah provinsi tersebut adalah

Gorontalo, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Bengkulu, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Lampung sebagaimana terdapat pada kotak berwarna merah pada Gambar 3.3 di bawah ini. Pada sejumlah provinsi yang masuk dalam kotak merah pada Gambar 3.3 tersebut, pemerintah pusat harus memastikan bahwa Pemprov tersebut mendapatkan dua arah kebijakan, yakni kenaikan TKD secara terarah dan memperkuat kemandirian fiskal tiap daerah tersebut.

Gambar 3.3. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Transfer ke Daerah Seluruh Provinsi, 2024



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Pada arah kebijakan pertama, pemerintah pusat harus memastikan terimplementasinya prinsip pemerataan pembangunan agar mengarahkan daerah dengan KFD yang rendah dapat menerima dana TKD secara proporsional untuk kebutuhan pembangunan di daerahnya. Pemerintah patut menjadikan berbagai indeks yang mampu mengukur kesenjangan antar daerah sebagai arah kebijakan DAU. Sebagai contoh, Indeks Williamson, Indeks Theil, atau Indeks Atkinson layak menjadi pedoman strategis penentuan DAU ke depannya.

DAU sebagai sebagai salah satu variabel TKD perlu untuk terus dipantau agar tujuan penyaluran dana untuk pemerataan pembangunan dapat tercapai. Pada saat ini, DAU merupakan penjumlahan dari Alokasi Dasar (AD) dan Celah

Fiskal (CF). Komponen AD merupakan Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun ke depan. Adapun komponen CF terdiri dari Kebutuhan Fiskal (KbF) dikurangi Kapasitas Fiskal (KpF). KbF terdiri merupakan formula yang berasal dari perhitungan Total Belanja Daerah (TBD) x (% Jumlah Penduduk) + (% Luas Wilayah) + (% Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) + (% Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)) + (% Pendapatan Domestik Regional Bruto). Sedangkan KpF berasal dari (% Pendapatan Asli Daerah) + (% Dana Bagi Hasil). Dalam hal ini, evaluasi dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat atas formula DAU. Sebagai contoh, pemerintah dapat memasukkan variabel kemiskinan agar dana DAU bisa lebih besar pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Ke depan, pemerintah juga perlu memasukkan variabel kemiskinan ekstrem dan kesenjangan agar pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di berbagai daerah di Indonesia.

Kebijakan kenaikan TKD secara terarah juga mesti mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik. Pada DAK fisik, faktor aksesibilitas dan konektivitas menjadi kunci pembangunan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat daerah. Dalam hal ini, pemerintah patut memasukkan tidak hanya infrastruktur fisik yang berada di darat untuk menunjang transportasi darat, tetapi juga dapat mencakup infrastruktur laut dan udara bagi daerah-daerah yang membutuhkan transportasi laut dan udara. Sebab, pembangunan infrastruktur laut dan udara di negeri kepulauan dan maritim seperti Indonesia harus terus diakselerasi untuk membuka berbagai kesempatan dan peluang sosial-ekonomi.

Selain itu, aksesibilitas dan konektivitas tersebut hendaknya tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek digital. Pembangunan internet yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia harus dipandang sebagai hak warga negara di era digital sehingga pemerintah harus menjangkau internet bagi seluruh warga negara hingga ke pelosok negeri. Dengan demikian, dana DAK fisik dapat menjadikan pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dan digital yang merata di seluruh daerah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) agar semakin meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas warga.

Pada DAK non fisik, idealnya anggaran tidak hanya diperuntukkan pada sektor pendidikan, melainkan juga sektor kesehatan. Sebab, pemerintah

hanya menganggarkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan), Tunjangan Guru ASN Daerah (terdiri dari Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru), dan Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah pada DAK non fisik di APBN 2026. Artinya, pemerintah mesti turut memperhatikan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Harapannya, pelayanan kesehatan dapat meningkat sehingga kualitas manusia di daerah dapat setara sebagai modal pembangunan di masa mendatang.

Pada arah kebijakan kedua, pemerintah patut memperkuat kemandirian fiskal tiap daerah dengan meningkatkan kapasitas dan basis fiskal di tingkat lokal sebagai solusi dalam jangka panjang. Pemerintah pusat harus senantiasa memberikan pendampingan kepada pemda agar terdapat bantuan secara teknis dalam mengidentifikasi potensi PAD yang belum tergalai atau belum optimal. Asistensi teknis ini turut mengarahkan pemda untuk melakukan modernisasi dan meningkatkan tata kelola sistem pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah kebocoran anggaran. Dengan demikian, semakin banyak pemda yang memiliki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang baik.

Dorongan kebijakan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal juga hendaknya terus dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemda dalam rangka meningkatkan sektor-sektor unggulan daerah. Analisis kewilayahan, misalnya via penghitungan *Locational Quotient/Index* atau *Specialization Index*, harus menjadi panduan bagi pemda dalam menentukan wilayah yang potensial atau spesial untuk pengembangan aktivitas perekonomian tertentu. Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat berperan untuk memfasilitasi kerja sama antar pemda yang memiliki potensi masing-masing sehingga dapat terbentuk sebuah kawasan pengembangan ekonomi lokal tertentu yang meliputi beberapa daerah di sebuah lokasi yang berdekatan.

Di samping itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemda serta antara BUMN dengan BUMD juga perlu terus diperkuat sehingga produk lokal dapat mencapai skala nasional dan global. Pada sisi lain, kerja sama tersebut bisa membuat aktor ekonomi nasional memperluas pasar produknya ke

memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga di dalamnya dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, terdapat enam provinsi yang memiliki KFD tinggi sekaligus PDRB per kapita besar sebagaimana terdapat pada bagian kanan-atas (kolom warna merah) Gambar 3.4 di atas, yakni provinsi Kalimantan Timur, Jakarta, Kalimantan Utara, Papua Barat, Riau, dan Papua Tengah. Keenam provinsi tersebut harus dijadikan contoh praktik terbaik bagi pemerintah provinsi lain di Indonesia.

Adapun bagi provinsi yang sudah punya rasio KFD yang baik, namun belum memiliki tingkat PDRB per kapita yang tinggi seperti yang terdapat pada bagian kiri-atas, pemprov tersebut harus fokus mentransformasi kemandirian fiskal daerahnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemprov harus mengalihkan sumber daya dari belanja rutin seperti belanja pegawai ke belanja modal yang produktif sehingga mampu menciptakan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian lokal. Dalam hal ini, pemprov dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk peningkatan kualitas manusia, misalnya pendidikan dan pelatihan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, atau untuk pembangunan infrastruktur penghubung antar daerah seperti jalan, jembatan, atau pelabuhan kecil untuk menurunkan biaya logistik dan membuka akses pasar bagi produk lokal.

Di samping itu, KFD yang tinggi dengan tingkat PDRB per kapita yang lebih rendah seringkali menjadi sinyal adanya kesenjangan kekayaan atau kebocoran perekonomian dimana keuntungan dari aktivitas ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat lokal. Maka, pemprov yang masuk kategori ini seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan patut memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan belanja tepat sasaran, mencegah praktik korupsi, serta menutup celah penyalahgunaan anggaran. Selain itu, pemprov juga dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih berkeadilan sehingga dana tersebut dapat dialihkan untuk program perlindungan sosial dan bantuan untuk masyarakat miskin.

Pada sisi lainnya, provinsi dengan KFD buruk namun memiliki PDRB per kapita tinggi mengindikasikan adanya kebocoran fiskal karena kekayaan

daerah tidak terkonversi menjadi PAD dan/atau ketidakmampuan mendapatkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Pemprov Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau harus melakukan intensifikasi dan optimalisasi PAD, misalnya melalui perluasan basis pajak dan modernisasi sistem pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua provinsi tersebut juga mesti mengendalikan dan mengefisienkan belanja daerah dengan merasionalisasi belanja rutin serta mengoptimalkan aset daerah yang tidak produktif.

Terakhir, kerja sama dan pendanaan eksternal juga menjadi peluang bagi kedua daerah ini karena memiliki tingkat PDRB per kapita yang tinggi. Eksplorasi potensi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sangat dimungkinkan untuk menarik investasi swasta, misalnya dalam bidang infrastruktur, karena pemprov memiliki potensi pengembalian tinggi yang tercermin dari tingkat PDRB per kapita yang besar. Selain itu, kedua pemprov tersebut memiliki potensi kelayakan yang tinggi untuk mengajukan pinjaman daerah kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat wajib memastikan agar pinjaman daerah tersebut digunakan untuk membiayai proyek yang produktif di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan PAD dan KFD di masa mendatang.

3.6. PP 38/2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat

Pengurangan anggaran TKD secara signifikan pada 2026 merupakan sebuah guncangan fiskal bagi pemda. Sebab, pengurangan tersebut berarti pemda harus mencari sumber penerimaan daerah baru untuk melaksanakan pembangunan daerah. Sebelumnya, sebanyak 104 kabupaten/kota telah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada 2025 ini. Bahkan, 20 kabupaten/kota di antaranya menaikkan PBB P2 lebih dari 100 persen⁴. Kenaikan PBB P2 tersebut pula yang memicu berbagai aksi protes di berbagai daerah sepanjang bulan Agustus dan September 2025, termasuk demonstrasi besar yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada awal Agustus lalu. Jadi, pemda harus berpikir lebih keras untuk

⁴ <https://www.tempo.co/politik/kemendagri-104-daerah-naikkan-pbb-20-daerah-naik-di-atas-100-persen-2060902>

mendapatkan penerimaan daerah dan melaksanakan pembangunan di tengah semakin minimnya TKD pada tahun 2026.

Dalam hal ini, pemerintah pusat memberi salah satu jalan keluar berupa pemberian pinjaman kepada pemda dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan bunga yang berada di kisaran angka 0,5 persen⁵. Sebagai catatan, pasal 19 dan bagian penjelasan pasal 19 menerangkan bahwa tingkat suku bunga pinjaman akan dibahas dalam perundingan antara pemerintah pusat dengan kepala daerah untuk pinjaman kepada pemda dan dengan direktur BUMD untuk pinjaman kepada BUMD. Jadi, angka persis tingkat suku bunga dapat terjadi perbedaan antara satu Pemda dan BUMD dengan Pemda dan BUMD lainnya.

Kemudian, PP 38/2025 tersebut juga mencantumkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemda dan BUMD untuk dapat mengajukan permohonan pinjaman. Selain itu, pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) juga masih akan melakukan penilaian kelayakan pemberian pinjaman dan meminta jaminan serta persetujuan dari berbagai pihak terkait sebelum akhirnya menyalurkan pinjaman kepada Pemda dan BUMD.

Meskipun demikian, persoalan dari pinjaman oleh pemerintah pusat terhadap Pemda dan BUMD ini bukan terkait prosedur dan tata kelola pinjaman. Persoalan paling fundamental atas kehadiran PP 38/2025 ini adalah terkait kemandirian daerah untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya. Sebab, pinjaman dari Pemda dan BUMD kepada pemerintah pusat juga berarti tercerabutnya otonomi daerah yang ditandai dari ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Pasalnya, pembayaran angsuran atas pinjaman tersebut akan berdampak terhadap semakin terbatasnya ruang fiskal daerah untuk melakukan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251103123305-4-681705/pemda-bumn-bisa-pinjam-ke-pusat-purbaya-pasang-bunga-cuma-05>

Selain itu, pinjaman tersebut juga semakin membuka ruang peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemda karena pemda memiliki kewajiban untuk membayar cicilan pinjaman daerah tersebut. Bahkan, Pemda dan BUMD berpotensi terjebak utang kepada pemerintah pusat sehingga semakin menegaskan kecenderungan semakin tersentralisasinya negara ini. Artinya, pemerintah pusat harus menghindari pemberian jebakan fiskal kepada daerah untuk membuat adanya ketergantungan dari Pemda dan BUMD kepada pemerintah pusat.

Hal tersebut juga belum memasukkan faktor perbedaan pencatatan utang antara utang dari sisi Pemda dan BUMD dengan utang pemerintah pusat dan BUMN. Sebagai contoh, Pemerintah China melalui produk *Local Government Financing Vehicle* (LGFV) selama ini telah menggelontorkan utang yang diperkirakan sebanyak USD 800 miliar kepada pemerintah daerah di China. Namun, pada tiga triwulan pertama 2025 terdapat 60 produk investasi tidak standar yang terkait LGFV memiliki risiko tinggi gagal bayar atau bahkan mengalami gagal bayar⁶. Padahal, Pemerintah China juga telah mengeluarkan paket utang senilai USD 1,4 triliun untuk menstabilkan keuangan daerah pada tahun lalu. Dalam konteks ini, utang pemerintah daerah menjadi utang terselubung karena tidak tercatat dalam anggaran resmi⁷.

Pengalaman Pemerintah China tersebut seharusnya menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia agar seluruh pinjaman dari pemerintah pusat kepada Pemda dan BUMD tercatat secara penuh dalam neraca pemda dan pemerintah pusat serta menegaskan pembatasan skema pinjaman *off-balance sheet*. Berikutnya, pemerintah pusat harus memastikan ketatnya atas seluruh persyaratan dan permohonan dari Pemda dan BUMD sehingga pinjaman hanya diberikan kepada proyek yang produktif meningkatkan PDRB dan menghasilkan penerimaan daerah secara signifikan. Terakhir, pinjaman tersebut harus tetap dijadikan sebagai instrumen pembiayaan, bukan mendikte prioritas belanja daerah yang dapat mencederai semangat desentralisasi fiskal.

⁶ <https://insight.kontan.co.id/news/gagal-bayar-surat-utang-china-capai-rekor-tertinggi-mencapai-us-800-miliar>

⁷ https://investor.id/international/416004/china-bentuk-departemen-baru-untuk-kendalikan-risiko-utang-daerah#goog_rewarded

Maka, terdapat tiga catatan atas implementasi PP 38/2025 ke depannya. Pertama, penetapan tingkat suku bunga pinjaman yang ditentukan melalui perundingan antara pemerintah pusat dengan Pemda dan BUMD harus dijadikan sebagai insentif peningkatan produktivitas dan efisiensi bagi penerima pinjaman. Kedua, pemberian pinjaman harus terlaksana dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pinjaman dijadikan sebagai alat perbaikan kinerja Pemda dan BUMD. Ketiga, rasio kemampuan bayar dari Pemda dan BUMD juga harus mempertimbangkan skenario terburuk ketika terjadi penurunan penerimaan daerah. Dengan demikian, Pemda dan BUMD yang belum memiliki kemampuan pengembalian pinjaman agar tidak bisa mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat tersebut.

BAB IV

MEMUTUS JERAT KETIMPANGAN PENDAPATAN

Fenomena ketimpangan pendapatan di Indonesia bersifat struktural dan multidimensi, berakar pada konsentrasi aset dan keuntungan yang memusat pada korporasi besar, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dominasi sektor informal, serta ketimpangan spasial antarwilayah. Meskipun kemiskinan menurun, distribusi pendapatan stagnan karena pertumbuhan ekonomi lebih bertumpu pada sektor kapital-intensif yang tidak menciptakan pemerataan kesempatan. Fenomena “serakahnomics”, *profit-led inflation*, dan stagnasi kelas menengah memperparah jurang kesejahteraan antarkelompok sosial, sektor, dan wilayah. Kesenjangan digital dan ketimpangan kualitas pekerjaan mempersempit mobilitas sosial, sementara kebijakan sosial yang dominan bersifat konsumtif belum mampu memperbaiki struktur ekonomi rumah tangga rentan. Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan secara substantif, pemerintah perlu mendorong reformasi pasar kerja, redistribusi fiskal progresif, penguatan modal manusia, pemerataan akses aset, serta transformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.

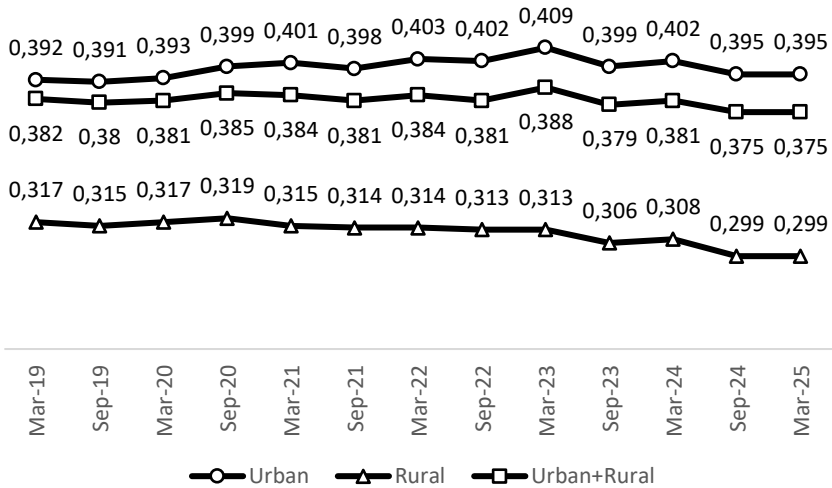
4.1. Pendahuluan

Ketimpangan pendapatan di Indonesia hingga kini masih mencerminkan persoalan struktural yang belum terselesaikan secara fundamental. Meski kemiskinan menurun, kesenjangan ekonomi tetap menjadi ciri laten dari model pertumbuhan nasional yang cenderung kapital-intensif, elitis, dan *rent-seeking*. Artinya, keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan absolut tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kesetaraan pendapatan.

Struktur ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh sektor-sektor berbasis rente dan padat modal seperti pertambangan, energi, dan keuangan yang keuntungannya terakumulasi di segmen atas distribusi pendapatan. Sementara itu, mayoritas tenaga kerja masih bergantung pada sektor informal dengan produktivitas rendah dan perlindungan sosial yang terbatas. Kombinasi antara konsentrasi kapital di atas dan stagnasi produktivitas di

bawah inilah yang menjadikan ketimpangan pendapatan sebagai gejala struktural yang sulit dikoreksi hanya dengan intervensi sosial bersifat jangka pendek seperti bantuan tunai.

Gambar 4.1. Rasio Gini di Indonesia 2019-2025



Sumber: BPS (2019-2025)

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) memperlihatkan bahwa Rasio Gini Indonesia bertahan di kisaran 0,37–0,39 selama hampir satu dekade terakhir, terjadi suatu bentuk stagnasi yang menandakan lemahnya efektivitas kebijakan redistributif. Di saat tingkat kemiskinan berhasil turun ke 9,03 persen, penurunan ketimpangan justru melambat karena pertumbuhan ekonomi lebih digerakkan oleh ekspansi sektor kapital intensif ketimbang sektor padat karya. Secara makro, *labor income share* terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan tren penurunan, sedangkan *corporate profit share* meningkat signifikan suatu pola yang umum dalam perekonomian yang mengalami deindustrialisasi dini dan finansialisasi berlebihan yang kurang mengait ke sektor riil.

Fenomena ini menandakan bahwa output nasional tumbuh tanpa memperkuat basis kesejahteraan pekerja. Indikator Gini pun cenderung menutupi akumulasi ekstrem di kelompok atas, sehingga perlu dilengkapi

dengan ukuran seperti Rasio Palma, Indeks Theil, dan proporsi pendapatan top 1 persen agar diagnosis ketimpangan menjadi lebih akurat dan multidimensional.

Jika dibandingkan secara regional, tingkat ketimpangan Indonesia masih tergolong tinggi di antara negara ASEAN. Rasio Gini Indonesia (0,38) melampaui Thailand (0,36) dan Vietnam (0,34), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum cukup inklusif secara spasial maupun sektoral. Hal ini diperburuk oleh stagnasi kelas menengah yang seharusnya menjadi jangkar konsumsi domestik dan pendorong stabilitas sosial-ekonomi.

Menurut World Bank (2025), hanya sekitar 20 persen penduduk Indonesia yang dapat digolongkan sebagai *sustainable middle class*, sementara 40 persen lainnya berada pada kategori *vulnerable middle class* lapisan rapuh yang mudah jatuh miskin akibat guncangan ekonomi, kenaikan harga pangan, atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada distribusi pendapatan saat ini, tetapi juga melahirkan *intergenerational inequality*, di mana pendapatan dan status sosial anak semakin ditentukan oleh posisi ekonomi orang tua, menandakan menurunnya mobilitas sosial antar generasi.

Dari perspektif spasial, kesenjangan antardaerah mempertegas ketidakseimbangan pembangunan nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita DKI Jakarta pada 2024 mencapai sembilan kali lipat dibandingkan Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Papua Barat, mencerminkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan kawasan metropolitan.

Struktur spasial semacam ini menciptakan *spatial inequality trap* di mana wilayah non-Jawa kesulitan menarik investasi produktif akibat keterbatasan infrastruktur, konektivitas, dan kapasitas sumber daya manusia. Ironisnya, meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB nasional, akses mereka terhadap pembiayaan formal hanya berkisar 20 persen dari total kredit perbankan. Ketimpangan dalam akses modal ini memperlebar jarak produktivitas dan profitabilitas antar segmen ekonomi, memperdalam asimetri antara ekonomi rakyat dan ekonomi korporasi besar.

Kondisi domestik tersebut sejalan dengan fenomena global yang disebut “serakahnonomics” yakni era ketika akumulasi laba dan kekayaan semakin terkonsentrasi di tangan 1 persen kelompok teratas. Berdasarkan *World Inequality Database* (2024), 10 persen kelompok terkaya di Indonesia menguasai sekitar 77 persen total kekayaan nasional, sedangkan 50 persen terbawah hanya menguasai 4,6 persen. Ketimpangan kekayaan ini diperparah oleh lemahnya sistem pajak progresif dan minimnya kebijakan redistribusi yang efektif. Oxfam (2024) mencatat, bahwa laba korporasi global meningkat hingga 52 persen pasca-Pandemi COVID-19 bukan karena peningkatan produktivitas, tetapi akibat ekspansi margin keuntungan (*markup*) yang bersumber dari *market power* korporasi besar.

Di Indonesia, pola serupa juga terlihat jelas di subsektor pangan olahan, energi, dan perbankan, dimana struktur pasar oligopolistik memungkinkan perusahaan besar mempertahankan *profit margin* tinggi bahkan di tengah inflasi. Akibatnya, muncul *profit-led inflation*, yaitu inflasi yang dipicu oleh ekspansi keuntungan, bukan oleh peningkatan biaya produksi, yang pada akhirnya memperdalam ketimpangan fungsional antara pemilik modal dan pekerja. Terjadinya stagnasi kelas menengah menjadi gejala sosial yang patut diwaspadai. Meski secara kuantitatif jumlahnya meningkat, kualitas kesejahteraan kelompok tersebut semakin stagnan dan rapuh.

Tekanan biaya hidup khususnya dari sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi menggerus daya beli dan menghambat akumulasi aset produktif. Ketimpangan kesempatan dalam memperoleh pendidikan bermutu dan pekerjaan layak mempersempit jalur mobilitas sosial vertikal. Akibatnya, kelompok menengah bawah semakin terjebak dalam *precarious middle class*, yakni lapisan masyarakat yang tidak miskin secara statistik tetapi rentan terhadap guncangan ekonomi. Situasi ini memperkuat fenomena *social middle-income trap*, di mana stagnasi kelas menengah menghambat proses pembentukan ekonomi inklusif dan memperlemah basis sosial bagi pertumbuhan jangka panjang.

Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan di Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan karitatif seperti bantuan sosial semata, melainkan harus melalui reformasi struktural yang terukur dan berbasis data.

Pemerintah perlu memperkuat instrumen redistribusi melalui sistem pajak yang lebih progresif, memperluas cakupan dan efektivitas transfer fiskal terarah, serta menegakkan hukum persaingan untuk memecah dominasi oligopoli pasar. Di sisi lain, kebijakan peningkatan keterampilan (*upskilling*) dan transformasi pendidikan vokasi menjadi penting untuk memperkuat produktivitas tenaga kerja dan memperluas basis kelas menengah. Secara spasial, strategi fiskal desentralistik berbasis kinerja daerah perlu diperkuat guna memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Dengan pendekatan tersebut, ketimpangan pendapatan bukan hanya dapat ditekan secara statistik, tetapi juga secara substantif melalui peningkatan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Indonesia membutuhkan paradigma pertumbuhan baru yang tidak sekadar menargetkan pertumbuhan tinggi, tetapi juga *shared prosperity* yakni pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Untuk itu, ketimpangan pendapatan di Indonesia harus dipahami bukan semata sebagai hasil perbedaan pendapatan individu, tetapi sebagai refleksi dari ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi, struktur produksi, dan kesempatan. Upaya mengatasinya menuntut kebijakan yang lebih terintegrasi antara redistribusi fiskal, reformasi pasar tenaga kerja, serta penguatan kelembagaan persaingan dan transparansi korporasi. Pendekatan ini akan memastikan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga adil secara distribusi dan berkelanjutan secara sosial.

4.2. Kondisi Struktur Ketimpangan di Indonesia

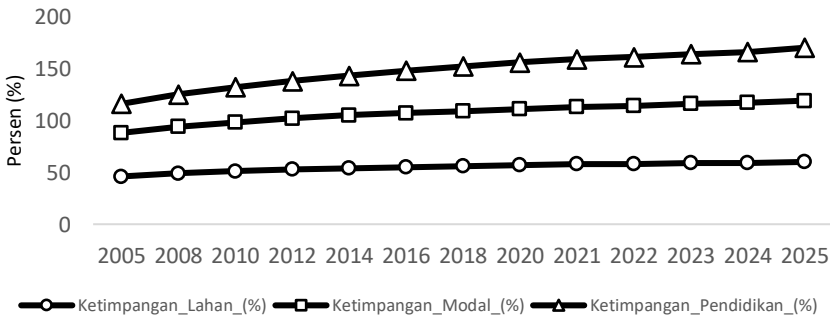
Di Indonesia struktur ketimpangan menggambarkan persoalan multidimensi yang berakar pada ketimpangan penguasaan aset, sumber pendapatan, serta konsentrasi keuntungan di sektor korporasi besar. Dalam satu dekade terakhir, distribusi kekayaan nasional semakin timpang, di mana 1 persen populasi terkaya menguasai lebih dari separuh aset finansial, sementara sebagian besar tenaga kerja masih terperangkap dalam pekerjaan informal dengan upah riil yang stagnan.

Ketimpangan pendidikan dan kesenjangan digital turut memperlebar disparitas produktivitas, sementara fenomena “serakahnomics” memperlihatkan meningkatnya dominasi laba korporasi besar yang memicu inflasi berbasis keuntungan (*profit-led inflation*) alih-alih pertumbuhan produktivitas. Akibatnya, jurang kesejahteraan antar sektor (pertanian vs industri), antar wilayah (Jawa vs luar Jawa), dan antar kelompok sosial (urban vs rural) kian melebar, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum cukup inklusif dan berkeadilan.

4.2.1. Ketimpangan Penguasaan Aset (Lahan, Modal, dan Pendidikan)

Struktur ketimpangan penguasaan aset di Indonesia mencakup tiga dimensi utama, yaitu lahan (*land*), modal (*capital*), dan pendidikan (*education*). Secara umum, ketimpangan aset di Indonesia masih berada pada level tinggi dan cenderung meningkat dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan *World Inequality Database (2024)*, sebanyak 1 persen populasi terkaya menguasai lebih dari 50,3 persen total aset finansial nasional. Konsentrasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok pemilik modal besar, bukan oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Ketimpangan kepemilikan ini menjadi refleksi dari lemahnya kebijakan redistribusi aset yang efektif. Hal ini diilustrasikan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Tren Ketimpangan Penguasaan Aset 2005-2025



*Bulan Februari 2025

Sumber: BPS, WID (World Inequality Database), Kementerian ATR/BPN, World Bank, dan UNESCO UIS

Pada aspek kepemilikan lahan (*land property*), data dari Kementerian ATR/BPN mengungkapkan bahwa sekitar 74 persen lahan produktif di Indonesia dikuasai oleh korporasi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit dan real estate. Berdasarkan tren data, tingkat ketimpangan lahan meningkat dari 46 persen pada 2005 menjadi 60 persen pada 2025, yang berarti bahwa 1 persen kelompok teratas menguasai 60 persen total lahan produktif nasional. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan *land grabbing* dan dominasi kepemilikan tanah oleh entitas korporasi besar, sementara petani kecil dan masyarakat desa mengalami keterbatasan akses terhadap tanah. Situasi ini memperburuk distribusi hasil produksi pertanian dan memperkuat ketimpangan antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Sementara itu, dari sisi modal (*capital inequality*), tren juga memperlihatkan arah yang sama. Dalam periode 2005–2025, proporsi kekayaan finansial yang dimiliki oleh 1 persen kelompok teratas naik dari 42 persen menjadi 59 persen. Konsentrasi ini mencerminkan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh kelompok elite pemilik modal dan perusahaan besar. Akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang ini memperlemah peluang akumulasi aset bagi kelas menengah dan pekerja. Rendahnya akses terhadap modal produktif bagi UMKM dan rumah tangga berpendapatan rendah semakin memperparah jurang ketimpangan dan membatasi kemampuan mobilitas sosial ekonomi antar kelas.

Selain lahan dan modal, dimensi pendidikan dan modal manusia (*human capital*) juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Proporsi penduduk usia kerja yang berpendidikan minimal SMA meningkat dari 28 persen pada 2005 menjadi 51 persen pada 2025, namun kualitas pendidikan dan akses terhadap keterampilan digital masih timpang. Menurut *Sakernas BPS (2024)*, sekitar 55 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMP dan hanya 23 persen yang memiliki keterampilan digital dasar. Kondisi ini memperlebar kesenjangan produktivitas tenaga kerja antara sektor tradisional dan sektor modern berbasis teknologi. Artinya, meskipun partisipasi pendidikan meningkat, kesenjangan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja menjadi faktor utama memperkuat ketimpangan struktural di Indonesia.

4.2.2. Ketimpangan Sumber Pendapatan

Ketimpangan sumber pendapatan di Indonesia mencerminkan struktur ekonomi yang masih timpang antar-sektor dan antar-kelompok sosial. Pekerja di sektor keuangan dan industri menikmati tingkat produktivitas serta upah riil yang jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja di sektor pertanian dan informal. Dalam dua dekade terakhir, produktivitas di sektor keuangan mencapai lebih dari 13 kali lipat produktivitas sektor pertanian, menandakan konsentrasi pendapatan pada kelompok berpendapatan tinggi dan berpendidikan tinggi yang bekerja di sektor modern. Sementara itu, mayoritas tenaga kerja di sektor informal dan pertanian menghadapi keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mobilitas pendapatan mereka stagnan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya inklusif, karena sumber-sumber pendapatan masih terkonsentrasi pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan padat modal.

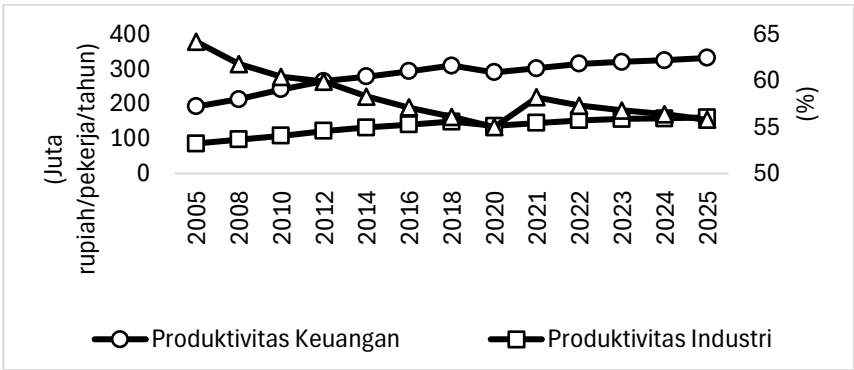
Struktur pendapatan rumah tangga di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh tingginya proporsi pekerja informal dan rendahnya produktivitas sektor padat karya seperti pertanian. Berdasarkan data *ILO (2024)*, tingkat informalitas tenaga kerja Indonesia mencapai 56,4 persen, termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja masih bekerja tanpa kontrak formal, jaminan sosial, atau upah tetap, yang secara langsung memperlemah distribusi pendapatan nasional dan memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga kelas bawah.

Selama dekade terakhir, upah riil per kapita tumbuh lambat dengan rata-rata hanya sekitar 1,2 persen per tahun sepanjang 2020–2024, bahkan sempat mengalami kontraksi sebesar -2,3 persen pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19. Lambatnya kenaikan upah ini berbanding terbalik dengan kenaikan biaya hidup dan akumulasi kekayaan kelompok berpendapatan tinggi. Buruh dan petani yang berada pada lapisan bawah distribusi pendapatan cenderung terjebak dalam stagnasi pendapatan karena minimnya mobilitas vertikal dalam struktur pasar tenaga kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menetes ke bawah (*trickle down effect*) secara signifikan, melainkan justru memperlebar kesenjangan kelas sosial.

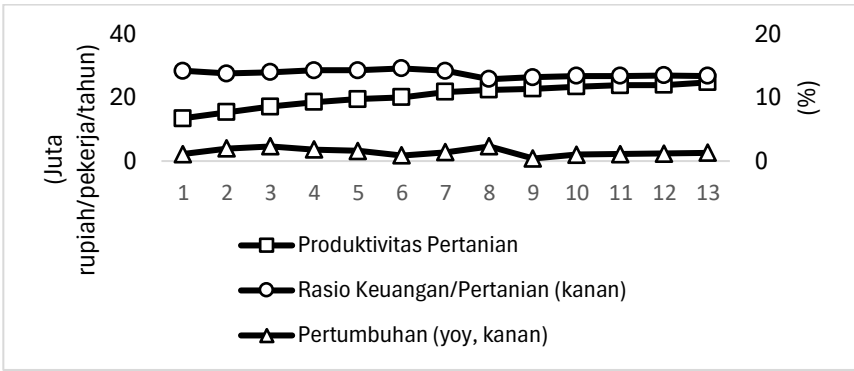
Dari sisi produktivitas, ketimpangan antar sektor ekonomi sangat mencolok. Pada tahun 2025, produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian

tercatat hanya sekitar Rp24,8 juta per pekerja per tahun, sedangkan industri mencapai Rp161 juta dan sektor keuangan bahkan Rp332 juta per pekerja per tahun. Artinya, produktivitas sektor keuangan hampir 14 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pertanian. Sektor pertanian yang masih menyerap sekitar 28 persen tenaga kerja menjadi sektor dengan produktivitas terendah, menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja nasional bekerja di sektor yang kontribusi pendapatannya relatif kecil terhadap PDB. Ketimpangan ini memperkuat ketidakseimbangan struktural antara sektor padat karya (*labor-intensive*) dan sektor padat modal (*capital-intensive*).

Gambar 4.3. Tren Ketimpangan Sumber Pendapatan 2005-2025



(a)



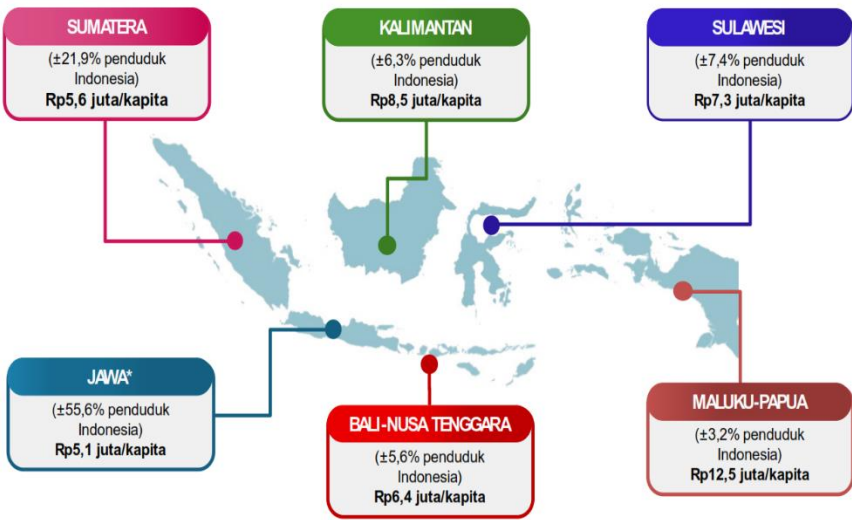
(b)

*Bulan Februari 2025

Sumber: BPS (Sakernas, Susenas), ILOSTAT, dan World Bank (World Development Indicators)

Ketimpangan sumber pendapatan yang bersifat kronis ini menandakan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih berorientasi pada pertumbuhan yang tidak inklusif. Kesenjangan produktivitas dan upah antara sektor padat modal dan sektor tradisional memperbesar jurang kesejahteraan antarkelompok pekerja. Sementara kelompok pemilik modal menikmati pertumbuhan keuntungan dari sektor keuangan dan industri, sebagian besar pekerja di sektor informal dan pertanian tetap berpenghasilan rendah tanpa perlindungan sosial memadai. Untuk mengurangi ketimpangan ini, diperlukan kebijakan struktural yang menekankan pada transformasi produktivitas pertanian, formalisasi tenaga kerja, peningkatan upah riil, serta redistribusi nilai tambah antar sektor agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menciptakan kesejahteraan yang merata.

Gambar 4.4. Ketimpangan Fiskal Daerah per Kapita



Sumber: RPJMN 2025-2029

Selanjutnya, berkaitan dengan ketimpangan spasial pendapatan per kapita antarwilayah di Indonesia yang masih signifikan. Wilayah Maluku–Papua mencatat pendapatan per kapita tertinggi Rp12,5 juta, namun dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 3,2 persen, menunjukkan bahwa kekayaan terkonsentrasi pada sektor ekstraktif berorientasi modal, bukan pada pemerataan kesejahteraan. Sebaliknya, Pulau Jawa yang menampung lebih dari 55 persen penduduk Indonesia hanya memiliki pendapatan per

kapita Rp5,1 juta, menandakan beban demografis tinggi dan tekanan terhadap produktivitas sektoral. Ketimpangan ini menggambarkan tantangan utama pembangunan nasional, di mana pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam di luar Jawa belum sepenuhnya menetes (*trickle-down*) menjadi kesejahteraan luas bagi masyarakat daerah.

Perbedaan fiskal per kapita antarwilayah menunjukkan ketimpangan struktural dalam kapasitas keuangan daerah, di mana wilayah kaya sumber daya seperti Maluku–Papua (Rp12,5 juta/kapita) dan Kalimantan (Rp8,5 juta/kapita) memiliki ruang fiskal jauh lebih besar dibandingkan Jawa (Rp5,1 juta/kapita) dan Sumatera (Rp5,6 juta/kapita) yang justru menampung mayoritas penduduk Indonesia. Ketimpangan ini berdampak pada kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik, membiayai infrastruktur, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga memperkuat kesenjangan pembangunan antarwilayah. Secara ekonomi, daerah berfiskal tinggi semakin menarik investasi dan produktivitas, sementara daerah berfiskal rendah terjebak dalam siklus keterbatasan fiskal dan pelayanan dasar yang minim. Oleh karena itu, kebijakan fiskal nasional perlu diarahkan pada reformasi *transfer ke daerah* yang lebih *equal*, berbasis kebutuhan riil dan kapasitas fiskal, agar desentralisasi benar-benar mendorong pemerataan dan tidak memperdalam kesenjangan antarwilayah.

4.2.3. Ketimpangan Karena Adanya Fenomena “Serakahnomics”

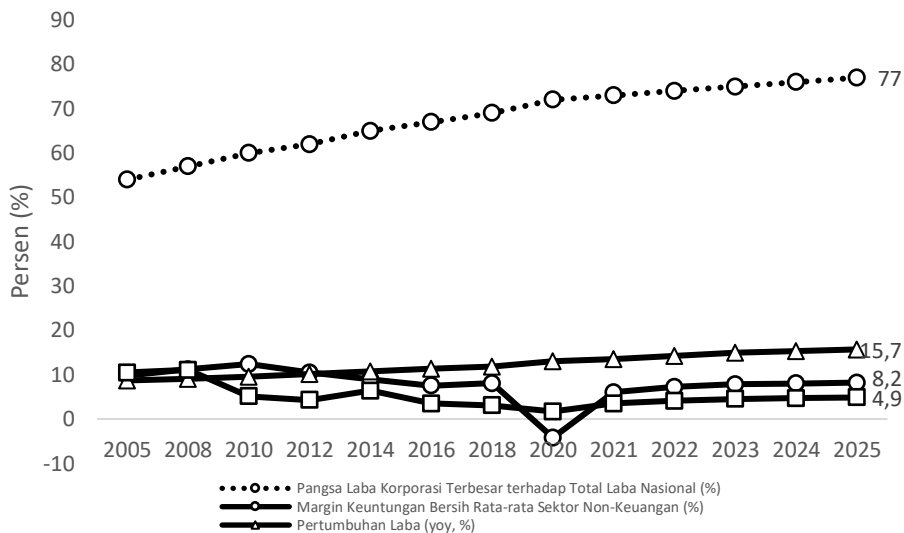
Dalam konteks global maupun domestik, fenomena “serakahnomics” menggambarkan perubahan arah pertumbuhan ekonomi yang semakin terkonsentrasi pada segelintir korporasi besar. Tren ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem kapitalisme modern, di mana produktivitas dan keuntungan tidak lagi terdistribusi secara proporsional kepada tenaga kerja, pelaku usaha kecil, maupun masyarakat luas. Globalisasi keuangan dan digitalisasi ekonomi telah memperkuat posisi korporasi besar untuk menguasai rantai nilai global, sementara pelaku ekonomi kecil tersisih dari aliran nilai tambah. Akibatnya, meskipun PDB tumbuh positif, pertumbuhan tersebut bersifat elitis dan menumpuk pada kelompok pemilik modal, bukan pada masyarakat yang berperan dalam proses produksi.

Tren peningkatan konsentrasi laba korporasi besar di Indonesia, yang menjadi indikasi kuat dari fenomena “*serakahnomics*” atau pertumbuhan ekonomi berbasis kerakusan modal. Pangsa laba 5 persen korporasi terbesar meningkat signifikan dari 54 persen pada 2005 menjadi 75 persen pada 2022 dan diproyeksikan mencapai 71 persen pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan nasional hanya terakumulasi pada kelompok kecil pelaku ekonomi besar, terutama di sektor padat modal seperti energi, perbankan, dan pangan olahan. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan distribusi hasil pembangunan yang tajam, di mana peran korporasi besar semakin dominan sementara pelaku UMKM dan tenaga kerja mendapatkan porsi nilai tambah yang kian menurun.

Hal ini diperkuat oleh Indikator pertumbuhan laba korporasi besar (yoy) memperlihatkan fluktuasi yang cukup tajam, dari 9,8 persen pada 2005 hingga mencapai puncaknya 22,4 persen pada 2022 (lihat Gambar 4.5). Lonjakan ini terjadi seiring pemulihan pasca-pandemi dan peningkatan harga komoditas global. Namun, di sisi lain, pertumbuhan laba yang tinggi tidak diikuti oleh penurunan ketimpangan, karena keuntungan lebih banyak dinikmati oleh kelompok modal besar. Penurunan pada 2020 sebesar -4,2 persen menggambarkan dampak pandemi terhadap korporasi besar, tetapi cepatnya *rebound* pada 2021–2023 menegaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia sangat *corporate-centric* dan tidak memberikan daya tahan setara bagi sektor kecil-menengah.

Sementara itu, margin keuntungan bersih sektor non-keuangan meningkat stabil dari 8,7 persen pada 2005 menjadi 15,8 persen pada 2023. Peningkatan ini memperlihatkan adanya *corporate greed inflation*, di mana kenaikan harga di tingkat konsumen tidak semata-mata disebabkan oleh biaya produksi, tetapi oleh strategi korporasi untuk memperluas margin keuntungan. Kenaikan margin ini berkontribusi pada inflasi yang bersifat struktural, di mana kelompok masyarakat berpendapatan rendah harus menanggung beban harga lebih tinggi tanpa peningkatan pendapatan yang sepadan. Fenomena ini mempertegas adanya ketimpangan antara produktivitas sektor kapital dan kesejahteraan rumah tangga.

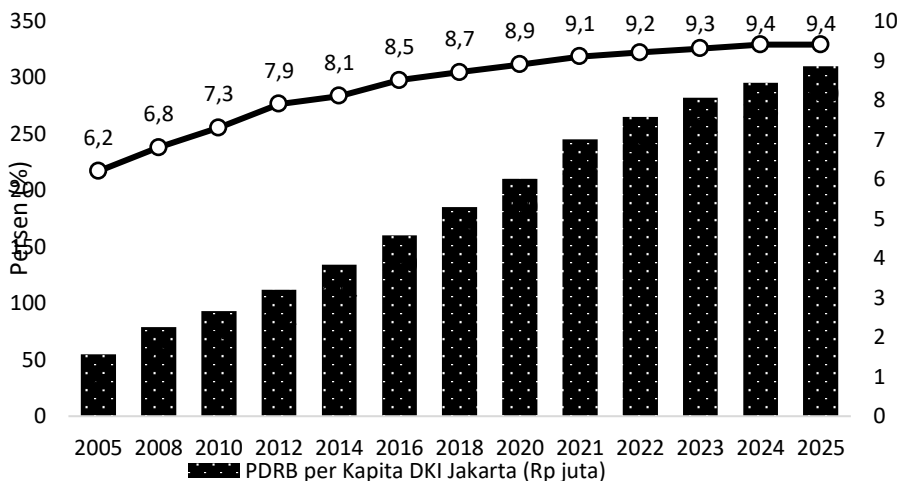
Gambar 4.5. Tren Ketimpangan Laba Korporasi dan Daerah 2005-2025



Sumber: BPS (Sakernas, Susenas), ILOSTAT, dan World Bank (World Development Indicators)

Fenomena *corporate greed inflation* ini marak terjadi pada subsektor pangan olahan, perbankan, dan energi, di mana tiga sektor yang berperan besar dalam struktur ekonomi Indonesia. Alih-alih efisiensi atau peningkatan produktivitas, korporasi besar justru menaikkan harga untuk menjaga profitabilitas di tengah stagnasi daya beli masyarakat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan pemerataan kesejahteraan: buruh dan petani yang berperan langsung dalam produksi hanya menikmati bagian kecil dari hasil pertumbuhan, sementara kelompok kapital menikmati surplus ekonomi dalam skala besar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengendalian harga dan pengawasan persaingan usaha perlu diperkuat untuk menekan perilaku ekonomi berbasis rente.

**Gambar 4.6. Tren Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi DKI dan NTT
2005-2025**



Sumber: BPS (Sakernas, Susenas), ILOSTAT, dan World Bank (World Development Indicators)

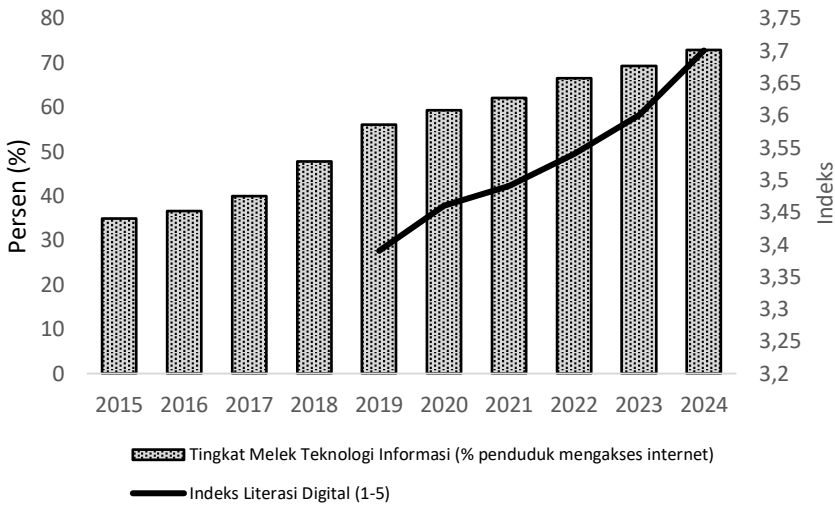
Gambar 4.6 di atas memperkuat bahwa indikator ketimpangan antarwilayah semakin terlihat dari rasio PDRB per kapita DKI Jakarta terhadap NTT yang naik dari 6,2 kali (2005) menjadi 9,4 kali (2024) dan diproyeksikan 9,5 kali pada 2025. Artinya, ketimpangan spasial ekonomi nasional terus melebar, di mana pusat-pusat pertumbuhan seperti Jakarta dan Jawa menikmati keuntungan ekonomi jauh lebih besar dibanding kawasan timur Indonesia. Dengan PDRB per kapita DKI mencapai Rp310 juta dan NTT hanya Rp32 juta, ketimpangan ini mencerminkan lemahnya efek *spillover* pertumbuhan nasional serta rendahnya pemerataan investasi produktif antarwilayah. Keseluruhan indikator menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif, distribusi hasil pembangunan tetap timpang baik antaraktor, antarwilayah, maupun antar-sektor.

4.2.4. Ketimpangan Literasi Digital dan Melek Teknologi Antar-Generasi

Selama 2015–2024, tingkat melek teknologi meningkat dari 34,9 persen menjadi 72,8 persen, menunjukkan perluasan akses internet lebih dari dua kali lipat. Sementara indeks literasi digital baru diukur resmi sejak 2021 dan naik

dari 3,49 ke 3,54, menandakan peningkatan keterampilan dasar digital namun belum signifikan. Kenaikan akses internet tidak sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi, sehingga tantangan literasi digital kritis terutama etika, keamanan, dan budaya digital masih tinggi (Gambar 4.7).

Gambar 4.7. Literasi Digital dan Tingkat Melek Teknologi Informasi 2015-2024



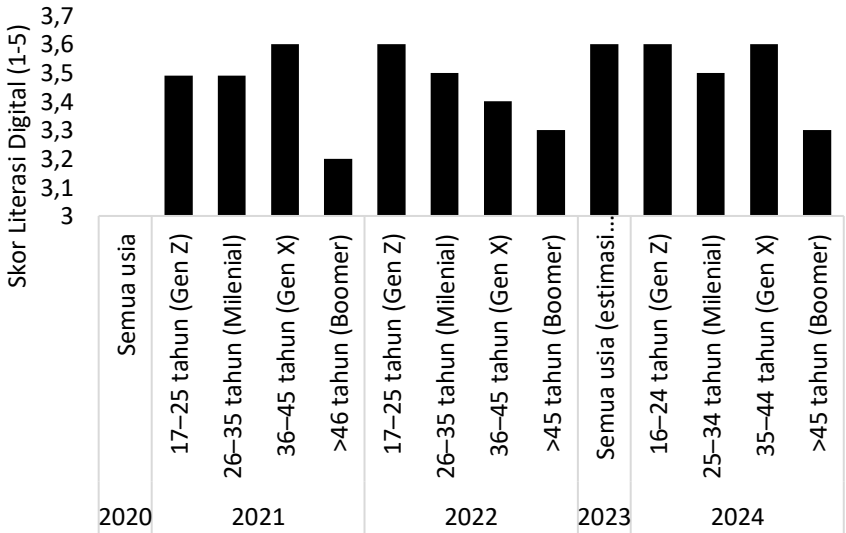
Catatan: Indeks Literasi Digital dari Tahun 2019 (tersedia)
 Sumber: Kominfo dan World Bank

Jika dibandingkan dari sisi literasi digital dan adaptasi teknologi, terdapat perbedaan mencolok antara Generasi *Baby Boomer*, Milenial, dan Gen Z (sering disebut *Digital Generation*). Generasi *Baby Boomer* (lahir 1946–1964) umumnya masih berorientasi pada sistem manual dan tatap muka, sehingga tingkat adopsi teknologinya relatif rendah meski sebagian telah beradaptasi dengan perangkat digital dasar seperti e-mail dan media sosial untuk komunikasi kerja. Sementara Generasi Milenial (lahir 1981–1996) menjadi kelompok transisi penting yang sangat melek teknologi, karena mereka tumbuh di era awal internet, ponsel pintar, dan media sosial, menjadikan teknologi sebagai alat produktivitas, inovasi, dan ekspresi diri. Adapun Generasi Z (lahir setelah 1997) merupakan generasi yang benar-benar *digital*

native hidupnya terintegrasi penuh dengan teknologi berbasis daring, AI, dan *platform* sosial. Mereka memiliki kecepatan adaptasi digital tinggi namun sering menghadapi tantangan dalam manajemen fokus dan etika digital.

Tren lima tahun terakhir (Gambar 4.8) menunjukkan bahwa kelompok usia muda (Gen Z dan Milenial) secara konsisten memiliki tingkat literasi digital tertinggi, seiring dengan tingginya penggunaan internet dan media sosial. Sebaliknya, kelompok usia di atas 45 tahun menunjukkan kesenjangan digital yang nyata, baik dalam aspek keterampilan teknis maupun keamanan digital. Skor rata-rata nasional naik dari 3,49 (2021) menjadi 3,54 (2022) dan diperkirakan 3,6 pada 2023, namun peningkatan paling signifikan terjadi pada kelompok usia muda, sementara kelompok lanjut usia mengalami stagnasi. Ini mengindikasikan perlunya strategi kebijakan literasi digital yang lebih inklusif lintas generasi, agar kesenjangan antarusia tidak memperlebar ketimpangan akses dan partisipasi digital di Indonesia.

Gambar 4.8. Indeks Literasi Digital Menurut Usia 2020-2024



Sumber: Kominfo dan World Bank

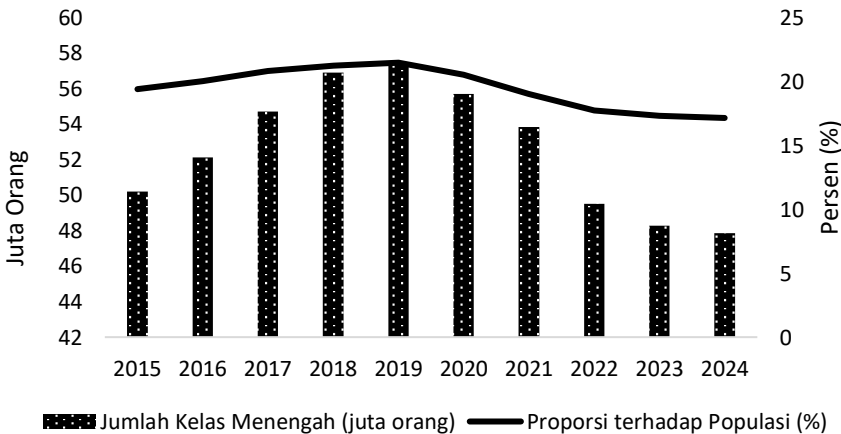
Dalam konteks kerangka Dana Pihak Ketiga (DPK) di sektor perbankan, perbedaan ini juga berpengaruh nyata. Generasi *Baby Boomer* cenderung mengandalkan transaksi konvensional dan simpanan berjangka. Milenial lebih

aktif dalam penggunaan *mobile banking*, investasi digital, dan layanan keuangan berbasis aplikasi; sementara Gen Z mendominasi transaksi mikro, *e-wallet*, dan platform digital terdesentralisasi. Pola ini menunjukkan transformasi struktural pada perilaku keuangan antar-generasi, di mana tingkat literasi digital berbanding lurus dengan intensitas dan diversifikasi instrumen keuangan yang digunakan.

4.3. Kelas Menengah dan Dinamika Sosial Ekonomi

Selama lima tahun terakhir, kelas menengah di Indonesia mengalami stagnasi mobilitas vertikal yang cukup signifikan. Berdasarkan data BPS (2020–2024), sekitar 44–46 persen penduduk masih tergolong kelas menengah rentan (*aspiring middle class*). Mereka yang mudah jatuh miskin bila terjadi guncangan ekonomi. Meskipun tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,36 persen (Maret 2024), namun pertumbuhan kelas menengah tidak mengalami percepatan berarti. Ketimpangan kesempatan kerja dan akses pendidikan menjadi faktor utama; data Sakernas menunjukkan 58 persen pekerja masih berada di sektor informal pada 2024, sementara akses pendidikan tinggi masih terkonsentrasi di kelompok menengah atas.

Gambar 4.9. Tren Proporsi dan Jumlah Kelas Menengah 2015-2024



Sumber: BPS (Sakernas, Susenas), World Bank (World Development Indicators)

Gambar 4.9 di atas menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah meningkat dari sekitar 50,2 juta orang (19,4 persen populasi) pada 2015 menjadi puncaknya 57,33 juta orang (21,45 persen) pada 2019, seiring pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5 persen dan peningkatan daya beli. Namun, sejak 2020 hingga 2024, jumlah tersebut menurun signifikan menjadi sekitar 47,85 juta orang (17,13 persen) akibat dampak pandemi, inflasi pangan, dan kenaikan biaya hidup yang menekan daya beli kelompok menengah. Penurunan ini menunjukkan terjadinya “shrinking middle class”, di mana banyak rumah tangga tergelincir kembali ke kelompok rentan akibat ketidakstabilan pendapatan dan terbatasnya kesempatan mobilitas vertikal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan struktural yang belum fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan akses pendidikan dan keterampilan, dan redistribusi fiskal untuk memperkuat daya beli dan ketahanan ekonomi rumah tangga menengah.

Dari sisi struktur ekonomi, Indonesia masih menghadapi dualisme sektoral antara sektor padat karya berproduktivitas rendah dan sektor padat modal berteknologi tinggi. Sektor pertanian, perdagangan, dan jasa tradisional masih menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap PDB kurang dari 40 persen (BPS, 2024). Sementara itu, sektor keuangan, teknologi informasi, dan pertambangan mengalami peningkatan nilai tambah yang tinggi namun dengan serapan tenaga kerja yang terbatas. Ketimpangan struktur ini menyebabkan peluang bagi pekerja berpendidikan rendah semakin sempit, mengunci mereka di sektor informal dan berpenghasilan stagnan. Dampaknya, pergeseran ekonomi ke arah industri berteknologi belum cukup mendorong mobilitas vertikal dari kelas bawah ke menengah.

Dengan kondisi ini, dinamika sosial menyebabkan keterbatasan mobilitas sosial ini memiliki implikasi langsung terhadap konsumsi domestik dan daya beli masyarakat kelas menengah. Data Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama PDB (52–54 persen), mulai melambat terutama di segmen menengah bawah. Tekanan inflasi pangan dan biaya pendidikan yang meningkat menggerus ruang konsumsi kelas menengah, sehingga mengurangi permintaan agregat. Hal ini menjadi tantangan bagi pertumbuhan inklusif, karena kelas menengah

berfungsi sebagai jangkar stabilitas konsumsi dan sumber utama investasi pendidikan bagi generasi berikutnya.

Secara kerangka makroekonomi, melemahnya permintaan agregat dari kelas menengah memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi. Ketika daya beli kelompok ini stagnan, ekspansi sektor ritel, properti, dan industri manufaktur menengah ikut terhambat. Pertumbuhan PDB Indonesia yang stabil di kisaran 5 perses dalam lima tahun terakhir belum cukup untuk memperluas peluang kerja berkualitas, karena sebagian besar pertumbuhan bersumber dari investasi korporasi besar dan belanja pemerintah, bukan dari peningkatan konsumsi masyarakat menengah. Dengan kata lain, ketimpangan struktural membatasi potensi pertumbuhan berbasis permintaan domestik.

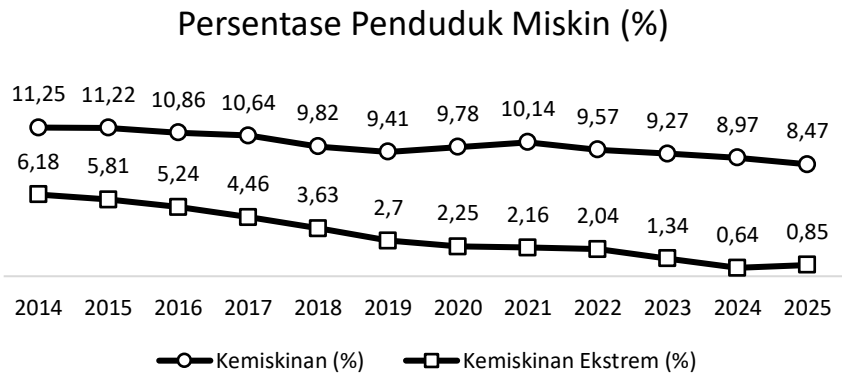
Ketimpangan konsumsi juga semakin memperlebar bias pertumbuhan antarwilayah. Bahkan data BPS (2024) menunjukkan konsumsi per kapita di wilayah perkotaan tumbuh 5,3 persen per tahun, jauh di atas pedesaan yang hanya 3,8 persen. Akibatnya, aktivitas ekonomi semakin terkonsentrasi di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Kelas menengah perkotaan menikmati akses digital, keuangan, dan pendidikan yang lebih baik, sementara wilayah rural tertinggal dalam produktivitas dan konektivitas ekonomi. Fenomena ini memperkuat ketimpangan spasial yang pada akhirnya menciptakan siklus stagnasi kelas menengah di luar Jawa.

Untuk mengatasi hal ini, kebijakan ekonomi perlu difokuskan pada perluasan kesempatan mobilitas vertikal melalui pemerataan akses pendidikan, pelatihan vokasional, dan transformasi sektor informal. Disamping itu, pemerintah perlu memperkuat program *upskilling* tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan ekonomi digital serta memperbaiki struktur upah minimum agar lebih mencerminkan produktivitas riil. Selain itu, kebijakan fiskal seperti *tax incentive* bagi UMKM modernisasi dan reformasi subsidi pendidikan menjadi penting untuk mendorong pembentukan kelas menengah baru yang berdaya saing. Tanpa intervensi struktural tersebut, stagnasi kelas menengah akan terus menjadi hambatan fundamental bagi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

4.4. Indikator Kesejahteraan: Kemiskinan, TPT, dan Kesejahteraan Sosial

Data satu dekade terakhir menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin dan pengangguran menurun perlahan, tetapi kualitas pekerjaan dan produktivitas stagnan, menghambat mobilitas sosial. Garis kemiskinan naik lambat, menandakan daya beli belum pulih seutuhnya, sementara ketimpangan wilayah dan umur tetap tinggi. Dengan TPT pemuda > 12 persen dan dominasi pekerjaan informal (> 58 persen), Indonesia menghadapi risiko “stagnasi kelas menengah” dan keterbatasan pertumbuhan inklusif. Dibutuhkan reformasi pasar kerja dan kebijakan fiskal berbasis produktivitas, bukan sekadar bantuan sosial, agar indikator kesejahteraan meningkat secara berkelanjutan.

Gambar 4.10. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem per Maret 2014-2025

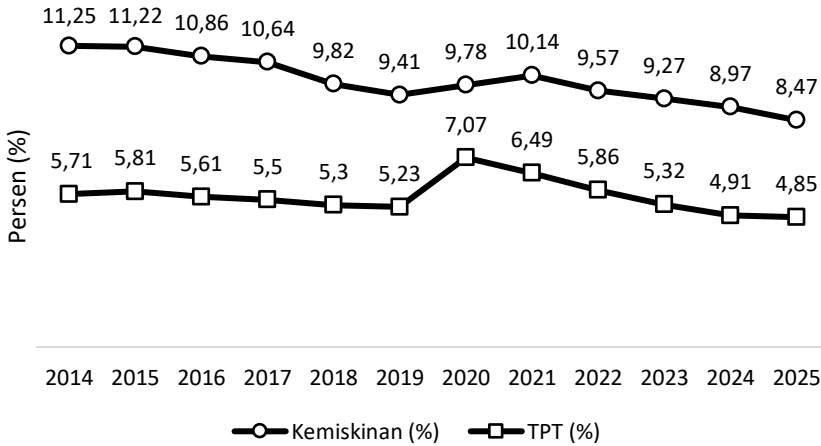


Sumber: BPS

Dari Gambar 4.10 nampak bahwa tren penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem selama 2014–2025 menunjukkan perbaikan yang konsisten, namun dengan dinamika yang mencerminkan kondisi ekonomi makro dan efektivitas kebijakan sosial. Kemiskinan turun dari 11,25 persen pada 2014 menjadi 8,47 persen pada 2025, dengan pola penurunan yang melambat setelah pandemi sebelum kembali stabil menurun seiring pemulihan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, kemiskinan ekstrem mengalami penurunan jauh lebih drastis dari 6,18 persen menjadi 0,85 persen, menegaskan keberhasilan intervensi bantuan sosial yang semakin terarah dan

peningkatan inklusi ekonomi kelompok rentan. Meski demikian, pencapaian ini tetap menyisakan tantangan struktural, terutama terkait ketimpangan spasial dan kualitas lapangan kerja, sehingga penurunan kemiskinan perlu diikuti penguatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah agar penurunan bersifat berkelanjutan.

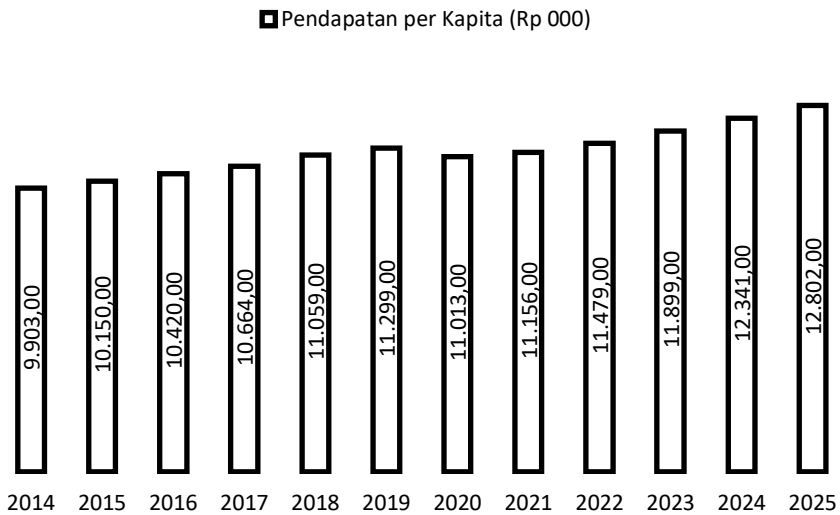
Gambar 4.11. Kemiskinan dan TPT Periode 2014-2025



Sumber: BPS

Adapun indikator kesejahteraan berikutnya adalah TPT. Tren kemiskinan dan TPT jika disandingkan selama 2014–2025, maka terlihat penurunan secara konsisten. Dinamika yang berbeda karena dipengaruhi siklus ekonomi yang tidak selalu searah. Kemiskinan terus turun dari 11,25 persen menjadi 8,47 persen, meski sempat melambat pada periode pasca pandemi. Sementara itu, TPT relatif stabil di kisaran 5 persen sebelum melonjak tajam menjadi 7,07 persen pada 2020 akibat kontraksi ekonomi pandemi, kemudian kembali menurun cepat seiring pemulihan pasar kerja dan pulihnya sektor-sektor padat karya seperti perdagangan, manufaktur, dan transportasi. Pola ini menunjukkan bahwa pemulihan ketenagakerjaan berlangsung lebih cepat dibanding pemulihan kemiskinan karena pendapatan kelompok miskin rentan belum pulih sepenuhnya, sehingga penurunan kemiskinan membutuhkan intervensi struktural seperti peningkatan produktivitas, *upskilling*, dan perlindungan sosial yang lebih adaptif. Hal tersebut dijelaskan dalam Gambar 4.11.

Gambar 4.12. Pendapatan Per Kapita 2014-2025



Sumber: BPS

Pendapatan per kapita Indonesia dipandang sebagai salah satu indikator kesejahteraan sosial yang sangat penting (lihat Gambar 4.11). Indikator ini menunjukkan tren meningkat dengan stabil sepanjang periode 2014–2025. Kondisi tersebut mencerminkan perbaikan kapasitas ekonomi rumah tangga seiring pemulihan sektor-sektor produktif dan membaiknya kualitas pekerjaan. Kenaikan dari sekitar Rp9,9 juta pada 2014 menjadi Rp12,8 juta pada 2025 mengindikasikan bahwa daya beli dan kesejahteraan material masyarakat mengalami peningkatan meskipun berjalan bertahap. Namun, grafik ini juga memperlihatkan fluktuasi pada 2020–2021 akibat pandemi yang menekan aktivitas ekonomi dan pendapatan buruh, sebelum kembali pulih dengan cepat setelah pemulihan pasar tenaga kerja dan peningkatan aktivitas industri serta jasa.

Meski pertumbuhan pendapatan per kapita tampak positif, indikator ini harus dibaca dengan hati-hati karena tidak menggambarkan pemerataan distribusinya. Kenaikan pendapatan agregat belum tentu dirasakan merata, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak guncangan ekonomi dan bekerja di sektor informal berproduktivitas rendah. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan per kapita perlu diimbangi dengan penguatan

kualitas pekerjaan, perluasan akses keterampilan, serta kebijakan redistribusi yang lebih progresif agar pertumbuhan benar-benar berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

4.5. Evaluasi Program Pengentasan Program Kemiskinan 2025

Secara umum, kinerja pengentasan kemiskinan tahun 2025 menunjukkan tren membaik, dengan kemiskinan turun ke sekitar 8,4–8,6 persen dan kemiskinan ekstrem berada di kisaran 0,8–0,9 persen. Penurunan ini mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi dan stabilnya konsumsi rumah tangga pasca pandemi. Namun, penurunan tersebut lebih bersifat *incremental* ketimbang transformasional. Sebagian besar masyarakat yang keluar dari kemiskinan masih berada di zona rentan (*near poor*) sehingga guncangan kecil seperti kenaikan harga pangan, gagal panen, atau PHK dapat membuat mereka kembali miskin. Artinya, pola penurunan masih sangat tergantung pada faktor siklus, bukan pada penguatan struktur ekonomi rumah tangga miskin.

Apabila dilakukan evaluasi efektivitas program bantuan sosial 2025 menunjukkan kemajuan melalui perbaikan data sasaran dan integrasi DTKS–P3KE. Program seperti PKH, BPNT, dan PIP tetap menjadi bantalan utama konsumsi masyarakat miskin. Namun, *problem* klasik belum terselesaikan *inclusion–exclusion error* masih tinggi di beberapa daerah, terutama yang memiliki kapasitas administratif lemah. Selain itu, penyaluran bansos yang masih dominan pada bantuan konsumsi membuat keluarga miskin sulit meningkatkan pendapatan produktif. Kebijakan pemberdayaan seperti pemberian modal UMKM kecil skalanya dan tidak terintegrasi dengan pelatihan keterampilan yang relevan, sehingga dampak jangka panjang terhadap mobilitas sosial terbatas.

Apabila dilihat dari sisi pasar kerja tahun 2025 menunjukkan bahwa pemulihan signifikan dengan TPT turun ke sekitar 4,8–4,9 persen, tetapi kualitas pekerjaan masih menjadi hambatan utama pengurangan kemiskinan. Mayoritas pekerja miskin beroperasi di sektor informal dengan pendapatan rendah dan produktivitas stagnan. Industri manufaktur padat karya yang *historically* menjadi mesin penyerapan tenaga kerja dimana belum

sepenuhnya pulih akibat lemahnya ekspor, biaya logistik tinggi, dan kompetisi produk impor murah. Di sisi lain, program peningkatan keterampilan seperti Kartu Prakerja belum optimal menjangkau kelompok miskin ekstrem, terutama keterbatasan akses digital, literasi, dan lokasi geografis.

Berkaitan dengan inflasi pangan yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat menjadi tantangan terbesar dalam mempercepat penurunan kemiskinan 2025. Kenaikan harga beras, cabai, dan daging yang persentasenya besar dalam konsumsi rumah tangga miskin dapat menggerus daya beli dan menahan dampak positif pemulihan ekonomi. Struktur rantai pasok pangan nasional yang panjang, minimnya infrastruktur penyimpanan, serta ketergantungan impor pada beberapa komoditas strategis membuat kerentanan inflasi pangan terus berulang. Tanpa reformasi sistem pangan nasional, keberhasilan program pengentasan kemiskinan akan sulit direalisasikan.

Selanjutnya, ketimpangan kinerja antarwilayah juga menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan belum inklusif. Penurunan cepat terjadi di Jawa, sementara wilayah timur seperti NTT, Papua, dan Maluku masih tertinggal karena akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi masih terbatas. Meskipun reformasi TKD 2025 mulai mengarah pada *output-based transfer*, implementasinya belum mampu mempersempit disparitas fiskal secara signifikan. Untuk mencapai kemajuan berkelanjutan, program pengentasan kemiskinan dan ketimpangan harus bergeser dari pendekatan bantuan konsumsi menjadi strategi pemberdayaan produktif yang terintegrasi dengan reformasi pasar kerja, transformasi sistem pangan, dan penguatan fiskal daerah.

4.6. Penutup: Rekomendasi Kebijakan

Ketimpangan pendapatan hanya dapat dikurangi melalui kombinasi kebijakan struktural (produktivitas dan pekerjaan), redistribusi fiskal, penguatan modal manusia, dan perbaikan tata kelola. Tanpa transformasi ekonomi dan reformasi pasar kerja, penurunan ketimpangan akan berjalan lambat dan mudah kembali naik ketika ekonomi mengalami guncangan.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia memerlukan intervensi kebijakan yang menasar akar strukturalnya, yakni rendahnya produktivitas tenaga kerja, dominannya sektor informal, dan disparitas antarwilayah. Upaya pengurangan ketimpangan harus dimulai dari reformasi pasar kerja melalui peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi, serta *reskilling* yang berbasis kebutuhan industri agar pekerja berpendapatan rendah dapat naik kelas.

Selanjutnya, kebijakan upah yang adaptif terhadap produktivitas, perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan, serta formalisasi sektor informal penting untuk menjaga stabilitas pendapatan kelompok bawah. Di sisi lain, kebijakan redistribusi fiskal perlu diperkuat melalui perpajakan progresif, subsidi tepat sasaran, dan penajaman transfer fiskal untuk daerah tertinggal guna memastikan belanja publik lebih berpihak pada kelompok rentan.

Selain itu, pengurangan ketimpangan pendapatan membutuhkan perbaikan akses terhadap aset produktif dan modal, terutama bagi petani kecil dan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Reforma agraria dan perluasan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) harus dipercepat dengan memastikan akses lahan diikuti dukungan pembiayaan, pendampingan, dan integrasi dalam rantai pasok industri. Selain itu, penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi menjadi fondasi penting bagi mobilitas sosial jangka panjang. Untuk memastikan efektivitas kebijakan, integrasi data kesejahteraan dan *monitoring* ketimpangan berbasis wilayah diperlukan agar intervensi lebih presisi. Kombinasi kebijakan (*mix policy*) seperti perubahan struktural, redistribusi fiskal, dan perbaikan tata kelola inilah yang dapat mempercepat penurunan ketimpangan pendapatan.

Dengan demikian, keberhasilan menurunkan ketimpangan pendapatan tidak hanya bergantung pada perluasan bantuan sosial atau kebijakan fiskal jangka pendek, tetapi pada kemampuan pemerintah memperkuat fondasi struktural mulai dari kualitas pekerjaan, akses modal dan aset, hingga layanan dasar agar setiap warga memiliki peluang yang setara untuk meningkatkan pendapatannya dan menikmati hasil pembangunan yang berkeadilan.

BAB V

PROYEKSI EKONOMI INDONESIA 2026

Ekonomi Indonesia menghadapi persimpangan yang krusial pada 2026: Di tengah ekonomi global yang rapuh, pelemahan rupiah, inflasi yang sensitif terhadap guncangan pangan–energi, dan pertumbuhan yang diproyeksikan moderat, bangsa ini ditantang untuk mengubah ancaman menjadi peluang. Ketergantungan pada konsumsi domestik, industrialisasi berbasis komoditas, serta dominasi pekerjaan informal menandakan bahwa pertumbuhan yang terjadi masih dangkal dan belum menyejahterakan secara merata. Meski tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan diperkirakan turun, perbaikan tersebut bersifat rapuh karena tidak ditopang oleh produktivitas, transformasi industri, dan kualitas pekerjaan yang memadai. Dengan tekanan eksternal yang meningkat dan ruang fiskal yang menyempit, Indonesia hanya dapat keluar dari jebakan stagnasi jika berani melakukan reformasi struktural yang konsisten—memperkuat daya saing industri, memperbaiki distribusi pangan, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan pertumbuhan benar-benar inklusif. Tahun 2026 bukan sekadar proyeksi angka, melainkan ujian ketangguhan arah pembangunan nasional menuju ekonomi yang lebih adil, tahan guncangan, dan berdaya saing.

5.1. Arah Ekonomi Global 2026

Memasuki 2026, perekonomian global diproyeksikan tumbuh secara moderat di tengah transisi menuju tatanan ekonomi baru yang lebih terfragmentasi dan terdigitalisasi. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* IMF (Oktober 2025), pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan berada pada kisaran 3,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,2 persen. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, diproyeksikan hanya tumbuh sekitar 1,5–1,6 persen, seiring kebijakan moneter ketat dan perlambatan konsumsi domestik. Sementara itu, kelompok negara berkembang dan pasar negara berkembang (*emerging markets*) masih menjadi motor utama ekonomi global dengan pertumbuhan rata-rata sedikit di atas 4 persen, didorong oleh ekspansi

manufaktur, investasi infrastruktur, serta pemulihan sektor jasa dan perdagangan internasional.

Namun demikian, *outlook* ekonomi global 2026 tidak lepas dari berbagai risiko dan ketidakpastian. IMF dan OECD mencatat meningkatnya proteksionisme perdagangan, disrupsi rantai pasok global, serta tekanan inflasi struktural akibat perubahan harga energi dan pangan. Kondisi suku bunga tinggi di negara-negara maju masih menahan arus modal ke pasar berkembang, sehingga menimbulkan potensi tekanan terhadap nilai tukar dan pembiayaan utang negara berkembang. Selain itu, percepatan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, dan otomatisasi industri membawa perubahan signifikan terhadap struktur tenaga kerja dunia—di satu sisi mendorong produktivitas, namun di sisi lain berpotensi mengurangi permintaan tenaga kerja berkeahlian rendah.

Dari sisi energi dan lingkungan, agenda transisi menuju ekonomi hijau menjadi faktor penting yang membentuk arah investasi global. Negara-negara dengan kemampuan beradaptasi terhadap regulasi karbon dan pengembangan energi terbarukan akan memperoleh peluang pertumbuhan baru, sedangkan negara yang tertinggal dalam inovasi teknologi hijau berisiko mengalami perlambatan. Di tengah kompleksitas tersebut, perekonomian dunia menuju 2026 cenderung bergerak dalam pola *slow but steady recovery*—pemulihan yang lambat namun berkelanjutan, dengan ketimpangan antarwilayah yang semakin nyata.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, dinamika global ini membawa implikasi strategis. Pelambatan pertumbuhan global berpotensi menekan ekspor dan investasi asing langsung, namun pada saat yang sama membuka peluang bagi diversifikasi ekonomi domestik dan integrasi lebih dalam ke rantai pasok regional dan global, terutama melalui kerangka kerja sama yang bersifat *Comprehensive Economic Partnership*. Oleh karena itu, arah kebijakan nasional pada 2026 perlu menekankan stabilitas makroekonomi, penguatan industri bernilai tambah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi terhadap dinamika dan transformasi ekonomi global yang semakin cepat.

5.2. Pertumbuhan Ekonomi

Prospek ekonomi Indonesia 2026 akan dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya faktor ketidakpastian yang dapat memicu berlanjutnya perlambatan ekonomi global. Pemulihan daya beli yang diharapkan terjadi pada tahun depan, berpotensi terhambat karena berbagai dinamika serta transformasi struktural yang tidak kunjung tuntas. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar 5,4 persen akan sulit dicapai jika tidak disertai berbagai kebijakan yang mampu mendulang kinerja berbagai indikator pembentuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu angka tersebut belum cukup untuk membawa Indonesia bertahan dalam zona *upper middle-income* dan menciptakan lapangan kerja formal secara masif. Dengan laju pertumbuhan penduduk usia kerja sekitar 1,3 persen per tahun, tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen berisiko hanya menghasilkan *growth without jobs*, yakni pertumbuhan yang tidak diikuti penciptaan lapangan kerja berkualitas secara memadai.

Struktur pertumbuhan Indonesia pada 2026 masih sangat bergantung pada konsumsi domestik yang menyumbang lebih dari separuh PDB. Ketergantungan yang berlebihan pada konsumsi menandakan daya dorong investasi dan ekspor masih terbatas. Investasi tetap bruto (GFCF/*Gross Fixed Capital Formation*) diperkirakan tumbuh 6-7 persen, tetapi mayoritas masih terkonsentrasi pada proyek-proyek hilirisasi mineral dan sektor *non-tradable* seperti konstruksi dan transportasi, yang efek penggandanya relatif kecil terhadap peningkatan produktivitas agregat. Sementara itu, ekspor nonmigas menghadapi tekanan akibat moderasi harga komoditas global dan melemahnya permintaan dari China sebagai mitra dagang utama Indonesia.

Dari sisi stabilitas makro, inflasi diproyeksikan tetap terkendali sejauh koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dapat berjalan dengan baik. Namun, yang harus dicatat adalah stabilitas harga yang terjadi saat ini lebih banyak disumbang oleh masih lemahnya permintaan domestik dan kontrol harga pangan, bukan oleh peningkatan efisiensi sektor produksi. Dengan demikian, struktur inflasi Indonesia masih bersifat *cost-push* dan sangat sensitif terhadap gangguan pasokan pangan dan energi.

Kebijakan fiskal 2026 diarahkan pada konsolidasi defisit di bawah 3 persen dari PDB, yang secara makro ditujukan untuk menjaga kredibilitas anggaran, tetapi di sisi lain juga dapat menekan kemampuan pemerintah untuk melakukan ekspansi belanja produktif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *trade-off* antara disiplin fiskal dan kebutuhan pembangunan. Tanpa peningkatan efisiensi belanja dan reformasi subsidi yang lebih terarah, ruang fiskal akan semakin terbatas untuk mendukung transformasi ekonomi dan pembiayaan infrastruktur jangka panjang.

Dari sisi ketenagakerjaan, struktur pasar tenaga kerja masih menghadapi masalah klasik: rendahnya produktivitas, dominasi sektor informal, dan *skill mismatch*. Data menunjukkan bahwa lebih dari 55 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal dengan tingkat upah dan produktivitas yang rendah. Tanpa percepatan reformasi pendidikan vokasi yang berdaya saing, insentif bagi industri padat teknologi, dan penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan industri 4.0, perbaikan angka pengangguran tidak akan sejalan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Secara struktural, tantangan utama perekonomian Indonesia pada 2026 adalah keterbatasan daya saing industri dan produktivitas faktor total (TFP/*Total Factor Productivity*) yang stagnan. Program hilirisasi yang digadagadag sebagai motor pertumbuhan jangka menengah memang meningkatkan ekspor bernilai tambah, tetapi masih berisiko menjadi *resource-based industrialization* — industrialisasi berbasis komoditas yang padat modal namun minim penyerapan tenaga kerja. Tanpa transfer teknologi dan peningkatan kapasitas manufaktur domestik, hilirisasi dapat berhenti pada fase “semi-finished goods export” tanpa memperkuat basis industri nasional.

Selain itu, arah kebijakan investasi yang terlalu berorientasi pada proyek besar (*mega projects*) dikhawatirkan menimbulkan ketimpangan spasial antarwilayah, karena manfaat ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di Jawa dan kawasan industri utama. Dari perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan antar-daerah dan memperlambat konvergensi kesejahteraan nasional.

Dalam konteks eksternal, posisi Indonesia pada 2026 akan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi kawasan dan hubungan dagang dalam

kerangka *Comprehensive Economic Partnership*. Integrasi ke rantai pasok regional membuka peluang peningkatan ekspor manufaktur dan investasi asing, tetapi juga menuntut peningkatan efisiensi logistik, kepastian hukum, dan kualitas tenaga kerja. Tanpa reformasi struktural yang konsisten, Indonesia berisiko menjadi sekadar *assembly base* dalam rantai pasok dunia, bukan *value creator*.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan dinamika ekonomi yang telah diuraikan tersebut maka INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar **5 persen**. Pertumbuhan 5 persen bukanlah persoalan angka semata, tetapi persoalan struktur. Pertumbuhan tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas, memperluas basis industri, dan memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja. Tantangan utama bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan mentransformasikan pertumbuhan menjadi pembangunan yang inklusif-berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.

5.3. Inflasi

Inflasi pada 2026 diperkirakan akan lebih tinggi dari 2025 yakni akan mencapai **3 persen**. Hal ini disebabkan akan terjadi peningkatan konsumsi akibat berbagai program stimulus pemerintah yang diprediksi mulai berdampak pada 2026. Namun membaiknya konsumsi belum diikuti oleh perbaikan pada kapasitas produksi. Inflasi tahun 2026 merupakan kombinasi tekanan permintaan (*demand*) yang sedikit membaik dengan penawaran (*supply*) yang *rigid*, terutama dalam sektor pangan dan energi. Termasuk Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diduga akan memperkuat permintaan pada jangka menengah (positif), namun dalam jangka pendek dapat menambah tekanan inflasi jika produktivitas *supply* tidak membaik.

Inflasi yang diperkirakan mencapai 3 persen tersebut mencerminkan kondisi stabilitas harga yang masih rapuh, karena kenaikan inflasi lebih banyak didorong oleh kombinasi tekanan penawaran (*cost-push*) dan permintaan (*demand-pull*) yang belum seimbang. Dari sisi penawaran, inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan akibat ketergantungan impor komoditas strategis seperti pangan, bahan baku untuk industri, serta

ketidakpastian iklim yang mengganggu produksi domestik. Sistem distribusi pangan nasional yang panjang dan tidak efisien membuat gejolak harga mudah terjadi, sehingga komponen *volatile foods* menjadi pendorong utama lonjakan inflasi 2026. Selain itu, rencana pemerintah untuk menormalkan harga energi—melalui penyesuaian tarif listrik, BBM nonsubsidi, dan penyempurnaan subsidi LPG—menambah tekanan biaya produksi, sehingga menghasilkan inflasi dorongan biaya yang signifikan. Depresiasi Rupiah di tengah ketidakpastian global juga meningkatkan *imported inflation*, khususnya untuk bahan bakar dan bahan baku industri yang sebagian besar masih diimpor.

Program MBG pada dasarnya memiliki potensi besar untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan kualitas SDM, dan menahan tekanan inflasi pangan dari sisi permintaan. Namun, efektivitas program ini belum sepenuhnya didukung oleh perbaikan sistem distribusi pangan nasional, sehingga *outcome* yang diharapkan belum optimal. Tanpa reformasi logistik pangan—termasuk peningkatan kapasitas *cold chain*, integrasi data pasokan antar-daerah, efisiensi distribusi antarpulau, serta penguatan peran BUMN Pangan dan *buffer stock*—program MBG berisiko menciptakan *demand shock* baru terhadap komoditas tertentu. Kenaikan permintaan yang tidak diimbangi kelancaran distribusi dapat memicu *demand-pull inflation* pada komoditas pangan strategis.

5.4. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS pada 2026 akan mencerminkan peningkatan tekanan eksternal dan domestik yang belum sepenuhnya dapat diatasi oleh kebijakan moneter maupun fiskal. Dari sisi eksternal, pelemahan Rupiah terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian dari dinamika ekonomi global. Ketidakpastian geopolitik global—seperti ketegangan di Timur Tengah, perlambatan ekonomi China, dan fragmentasi perdagangan—meningkatkan aversi risiko investor dan menekan mata uang *emerging markets*, termasuk Rupiah. Sementara itu, dari sisi domestik, defisit neraca perdagangan non-komoditas (barang modal), ketergantungan impor bahan baku manufaktur, pangan strategis dan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah turut menambah tekanan terhadap Rupiah. Tingginya kebutuhan impor energi

akibat pola subsidi energi yang belum efisien juga menciptakan *structural demand for US\$*, yang semakin melemahkan posisi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Tekanan pada nilai tukar akan membawa implikasi penting bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, Rupiah yang bergerak ke Rp17.000 per US\$ dapat meningkatkan daya saing harga ekspor—terutama bagi sektor manufaktur dan UMKM yang berorientasi ekspor—namun manfaatnya terbatas karena struktur ekspor Indonesia masih didominasi komoditas yang harganya ditentukan pasar global, bukan harga domestik. Di sisi lain, dampak negatifnya jauh lebih luas: *imported inflation* meningkat karena biaya impor bahan baku dan barang modal naik, sehingga mendorong kenaikan harga barang konsumsi. Industri manufaktur yang bergantung pada impor bahan baku akan menghadapi kenaikan biaya produksi, menekan margin keuntungan, dan berpotensi melemahkan proses industrialisasi. Melemahnya rupiah juga meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah dan korporasi yang berdenominasi dolar, sehingga mempersempit ruang fiskal dan memperbesar risiko kredit.

Selain itu, jika Pemerintah dan Bank Sentral tidak dapat menjaga stabilitas nilai tukar, maka dalam jangka panjang dapat memicu pengetatan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga BI, yang pada gilirannya menekan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, proyeksi Rupiah **Rp17.000 per US\$** tidak hanya mencerminkan tekanan jangka pendek, tetapi juga menunjukkan *problem* struktural dalam perekonomian Indonesia, yakni ketergantungan pada impor bahan baku, lemahnya diversifikasi ekspor, tingginya kebutuhan pembiayaan dolar, dan belum efektifnya upaya memperkuat industri dalam negeri. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan industri, fiskal, dan moneter yang terkoordinasi, tekanan pada Rupiah pada 2026 dapat menjadi hambatan signifikan bagi stabilitas makro dan transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

5.5. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2026 diperkirakan akan terus menurun menyentuh angka **4,75 persen**. Meskipun TPT secara konsisten terus menurun, namun ini belum menunjukkan perbaikan pada kualitas pekerjaan serta belum memiliki daya tahan dari berbagai gejolak. Capaian TPT pada 2026 seakan menyamarkan masalah kualitas pekerjaan dan kerentanan struktural pasar tenaga kerja. Secara kausal, penurunan TPT ke level tersebut kemungkinan besar didorong oleh kombinasi permintaan tenaga kerja jangka pendek seperti percepatan proyek infrastruktur, hilirisasi industri, dan program publik berskala besar (misal program MBG gizi, padat karya). Selain itu, penyerapan tenaga kerja di sektor jasa dan informal juga diprediksi meningkat, hal ini menunjukkan bahwa untuk masuk ke lapangan pekerjaan berkualitas masih menjadi tantangan bagi angkatan kerja.

Di sisi penawaran, dinamika demografis menambah jumlah angkatan kerja baru, namun *mismatch* keterampilan antara lulusan pendidikan formal dan kebutuhan industri tetap tinggi. Implikasinya adalah banyak penyerapan terjadi pada pekerjaan berupah rendah atau kontrak temporer. Selain itu, otomatisasi pada subsektor manufaktur dan penggunaan teknologi di sektor jasa akan berisiko menggeser pekerjaan berkeahlian rendah.

Dalam jangka pendek, penurunan angka TPT akan memperkuat konsumsi domestik dan menurunkan tekanan fiskal, namun dalam jangka menengah jika pekerjaan yang terbentuk lebih didominasi status informal atau berkontrak, maka produktivitas agregat sulit untuk meningkat dan upah riil akan stagnan, sehingga perbaikan kesejahteraan rumah tangga menjadi terbatas. Pemerintah perlu memindahkan fokus kebijakan dari sekedar menurunkan persentase pengangguran menuju meningkatkan kualitas pekerjaan dan memastikan transisi ke sektor formal. Hal ini menuntut kebijakan vokasi yang terintegrasi dengan industri (sertifikasi berbasis kebutuhan pasar dan magang yang terstruktur), insentif bagi perusahaan untuk merekrut pekerja tetap dan mensubstitusi pekerjaan informal, serta perluasan jaminan sosial yang mencakup pekerja informal. Di samping itu, kebijakan di bidang industri harus diarahkan pada pengembangan sektor padat kerja yang bernilai tambah dan mampu menyerap tenaga kerja terampil menengah, bukan sekedar proyek

kapital intensif yang menyumbang sedikit lapangan kerja. Pengukuran dan *monitoring* TPT harus diperhalus (memisahkan *unemployment*, *informal employment*, dan *discouraged workers*) sehingga kebijakan berbasis data dapat menutup celah antara angka makro yang tampak positif dan realitas kesejahteraan tenaga kerja di lapangan.

5.6. Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini

Tahun 2026, INDEF memperkirakan angka kemiskinan pada level **8,45 persen** dan Rasio Gini di angka **0,373**. Tingkat kemiskinan dan Rasio Gini memang cenderung turun, namun penurunan kemiskinan yang lambat mengurangi potensi kenaikan konsumsi domestik yang inklusif. Rumah tangga miskin tetap rentan terhadap guncangan.

Rasio Gini diprediksi mencapai 0,373 atau tidak jauh lebih baik dibanding 2025. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan tetap timpang sehingga keuntungan pertumbuhan ekonomi relatif terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi dan proyek-proyek kapital intensif (hilirisasi, mega-infrastruktur) cenderung menghasilkan output dan menyerap tenaga kerja berkeahlian tinggi sehingga manfaatnya tidak merata. Di sisi lain, pasar tenaga kerja yang didominasi sektor informal dan pekerjaan berupah rendah juga menahan kenaikan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan. Selain itu, tekanan harga pangan dan energi (*cost-push shocks*) akan semakin membebani rumah tangga berpendapatan rendah sehingga mereduksi daya beli mereka.

Struktur perpajakan dan alokasi belanja publik yang kurang progresif membuat redistribusi pendapatan relatif lemah. Relatif tingginya Rasio Gini akan menekan permintaan agregat (karena *marginal propensity to consume* lebih tinggi pada rumah tangga miskin), sehingga pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis mentranslasi menjadi pengentasan kemiskinan.

Pemerintah harus menggeser fokus dari hanya menurunkan angka kemiskinan absolut ke strategi peningkatan kualitas inklusi (*cash transfers*, bantuan pangan, subsidi pendidikan/ kesehatan). Pemerintah juga perlu memperluas jaminan sosial untuk pekerja informal, mempercepat formalitas UMKM melalui insentif dan akses pembiayaan. Selain itu perlu investasi

terukur pada pendidikan vokasi yang *link-and-match* dengan industri, peningkatan infrastruktur logistik di wilayah tertinggal, dan kebijakan upah yang pro-produktif. Semua program harus dirancang untuk menaikkan produktivitas pekerja miskin atau rentan dan memperpendek jalur dari bantuan sementara menuju pendapatan berkelanjutan. Tanpa langkah-langkah terarah tersebut, penurunan kemiskinan dan Rasio Gini hanya menandakan perbaikan kuantitatif yang rapuh dan berisiko menumbuhkan ketimpangan jangka panjang yang mengganggu legitimasi sosial dan potensi pertumbuhan inklusif.

Tabel 5.1. Ringkasan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026

Indikator	Proyeksi INDEF
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0 %
Nilai Tukar Rp/US\$	Rp17.000
Tingkat Inflasi (%)	3,0 %
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	4,75%
Tingkat Kemiskinan (%)	8,45 %
Rasio Gini	0,373

Sumber: Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 - INDEF (2025)

Daftar Pustaka

- Aryal, N. (2025). Nepal in Turmoil: Gen Z Protest, Political upheaval, and the Quest for Reform. *Social Science Research Network*.
- Badan Pusat Statistik. (2019–2025). *Statistik Indonesia (Berbagai Edisi)*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia 2018–2023*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2024*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Maret 2024*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kemiskinan dan Ketimpangan 2014–2024*. BPS.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III-2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024). *Innovating with Integrity Fostering Loyalty*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- IMF. (2025). *WORLD ECONOMIC OUTLOOK Global Economy in Flux, Prospects Remain Dim*. Washington, DC: International Monetary Fund, Publication Services.
- INDEF, CORE Indonesia, dan The Prakarsa. (2025). *Pernyataan Sikap (CORE Indonesia – INDEF – The Prakarsa)*. Retrieved from INDEF: <https://indef.or.id/pernyataan-sikap-core-indonesia-indef-the-prakarsa/>
- International Bank for Reconstruction and Development / World Bank. (2025). *Commodity Markets Outlook October 2025*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development / World Bank.
- International Labour Organization. (2024). *Indonesia Labour Market Update 2024*. ILO.

- International Labour Organization. (2024). *ILOSTAT Database: Labour Market Indicators for Indonesia*. ILO.
- International Labour Organization. (2023). *Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2023*. ILO.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Kinerja Reforma Agraria Nasional 2015–2023*. ATR/BPN.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). *Statistik Pertanahan Indonesia 2024*. ATR/BPN.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025). *Laporan Pengelolaan dan Distribusi Lahan Produktif 2025*. ATR/BPN.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021–2024). *Indeks Literasi Digital Indonesia (Berbagai Edisi)*. Kominfo.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. Kominfo.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Rancangan Teknokratik RPJMN 2025–2029*. Bappenas RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *RPJMN 2025–2029: Draft Final*. Bappenas RI.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, Agustus 17). *Asta Cita sebagai Kerangka Pembangunan Nasional 2025–2029*. Retrieved from setneg.go.id: <https://www.bappenas.go.id/%E2%80%A6>
- Kominfo & World Bank. (2022). *Indonesia Digital Readiness Assessment*. Kominfo–World Bank.
- Kompas. (2024, Desember 10). *Pekerja Informal Kian Mendominasi, Kepesertaan Jamsostek Seret*. Retrieved from kompas.id: <https://www.kompas.id/artikel/pekerja-informal-terus-naik-kajian-ombudsman-ri-kepesertaan-jamsos-ketenagakerjaan-seret>

- Kumar, V. (2025). The role of Gen Z in shaping Nepal's democratic discourse: Opportunities and challenges. *International Journal of Humanities and Social Science Research*, Volume 11, Issue 5, 2025, Page No. 153-155.
- OECD. (September 2025). *OECD Economic Outlook, Interim Report Finding the Right Balance in Uncertain Times*. Paris: OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/67b10c01-en>.
- Oxfam International. (2024). *Inequality Inc: How Corporate Power Divides the World and Harms the Poor*. Oxfam.
- Oxfam International. (2024). *Survival of the Richest: Global Inequality in the Post-Pandemic Recovery*. Oxfam.
- Seitz, W. H. (2025, October 24). *Reforms for a Formal and Prosperous Indonesia*. Retrieved from Barenbang, Kemnaker: <https://www.youtube.com/watch?v=891tD0ghPng>
- the 2025 G20 Extraordinary Committee of Independent Experts on Global Inequality. (2025). *Global Inequality*. South Africa: the 2025 G20 Extraordinary Committee of Independent Experts on Global Inequality.
- UN Department of Economic and Social Affairs and The United Nations University World Institute for Development Economics Research. (2025). *The World Social Report 2025: A New Policy Consensus to Accelerate Social Progress*. United Nations.
- Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
- Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- World Bank. (2025). *Global Economic Prospects June 2025*. Washington DC: World Bank Publications.
- World Bank. (2024). *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis*. Washington, DC : World Bank.

World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Boosting Investment for Higher Growth*. World Bank Group.

World Bank. (2024). *Indonesia Poverty Assessment 2024*. World Bank Group.

World Bank. (2025). *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*. World Bank Group.

World Bank. (2023–2025). *World Development Indicators (WDI)*. World Bank.

World Inequality Lab. (2024). *World Inequality Report 2024*. WID.world.

Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) 2026 disusun oleh INDEF dengan mengangkat tema “Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” merupakan refleksi atas masih lebarnya kesenjangan ekonomi yang telah memicu berbagai protes massa baik di pusat maupun daerah. Buku PEI ini mengupas dinamika ekonomi, sosial, dan politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir melalui empat lensa utama: tekanan ekonomi domestik dan gejolak global yang menggerus daya beli dan kinerja APBN; memburuknya kualitas ketenagakerjaan akibat dominasi informalitas tanpa perlindungan memadai; resentralisasi kewenangan yang melemahkan otonomi daerah dan memperdalam ketimpangan fiskal serta pembangunan antardaerah; serta jerat ketimpangan pendapatan yang bersifat struktural akibat konsentrasi aset, rendahnya produktivitas, dan ketimpangan kesempatan ekonomi. Melalui analisis mendalam, buku PEI ini menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan reformasi kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, fiskal, dan tata kelola pusat-daerah yang lebih progresif dan berpihak pada kelompok rentan agar transformasi ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial.